

TESIS

**EVALUASI PROGRAM PERCEPATAN PENCAPAIAN
TUJUAN DESA TANGGAP PENGENDALIAN DAN
PERUBAHAN IKLIM DI KABUPATEN GOWA**

*Evaluation of the programme to accelerate village goals on climate change
and control in gowa regency*



NURUL AULIA

Nomor Induk Mahasiswa: 105031101922

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

**EVALUASI PROGRAM PERCEPATAN PENCAPAIAN
TUJUAN DESA TANGGAP PENGENDALIAN DAN
PERUBAHAN IKLIM DI KABUPATEN GOWA**

TESIS

Disusun dan Diajukan oleh:

NURUL AULIA

Nomor Induk Mahasiswa: 105031101922

*“Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
magister (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar”*

PROGRAM PASCASARJANA

MAISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis Evaluasi Program Percepatan Pencapaian Tujuan Desa Tanggap Pengendalian Dan Perubahan Iklim Di Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa NURUL AULIA

Nim 105031101922

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik

Telah diuji dan dipertahankan di depan panitia Ujian Tutup pada tanggal 15 Agustus 2024 dan telah diperiksa serta diteliti sudah memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (M.AP) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, Agustus 2024

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

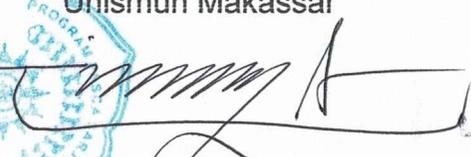

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

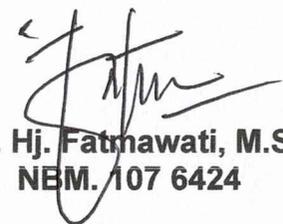

Dr. Burhanuddin, M.Si

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Administrasi Publik


Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd
NBM. 613 949


Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
NBM. 107 6424



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : NURUL AULIA

NIM : 105031101922

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Manajemen Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2024



Nurul Aulia

ABSTRAK

NURUL AULIA, 2024. Evaluasi Program Percepatan Pencapaian Tujuan Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan Iklim Di Kabupaten Gowa. Program studi Ilmu Administrasi Publik. Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Burhanuddin.

Tidak adanya pengendalian bencana alam akibat perubahan iklim dapat memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi terkait peran pemerintah desa dalam Penerapan program desa tanggap Pengendalian dan perubahan Iklim dengan Konsep SDGs di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, yang datanya diperoleh dari observasi, wawancara, studi dokumentasi dan kuesioner kepada 100 sampel dari total populasi yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi CIPP dari Stufflebeam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim di Kecamatan Barombong umumnya berhasil dalam mencapai tujuan. Meskipun ada beberapa kendala seperti kekurangan sarana dan prasarana, Finansial, dan perlu peningkatan SDM. Tingkat efektivitas dari implementasi program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim yang ada di Kecamatan Barombong dihasilkan bahwa ketiga Indikator yang diteliti pada 5 lokasi berada pada kategori baik. Sehingga perlu adanya peningkatan aspek komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Gowa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan Iklim dalam mencapai Target pada yaitu Indeks Ratio Bencana mencapai 0 diseluruh RT.

Kata Kunci: Perubahan Iklim; Sustainable Development Goals; Resilience; Pemerintah Desa

ABSTRACT

NURU AULIA. 2024. Evaluation of the programme to accelerate village goals on climate change and control in gowa regency. Pubic administration science study program. University of Muhammadiyah Makassar. Guded by Nuryanti Mustari and Burhanuddin.

The absence of control over natural disasters due to climate change can have very detrimental impacts on society, the economy and the environment. aim of this research was to evaluate the role of the village government in implementing the Responsive Village Program for climate control and change with the SDGs Concept in Gowa Regency. This research used qualitative and quantitative research methods, the data of which obtained from observation, interviews, documentary studies and questionnaires for 100 samples from the total population determined using purposive sampling techniques. The theory used in this research deployed the CIPP evaluation approach from Stufflebeam. The research results showed that the village program responding to climate change and control in Barombong district was generally successful in achieving its objectives. Although there are several obstacles such as lack of facilities and infrastructure, financial, and the need to increase human resources. The level of effectiveness of the implementation of the response village programme climate change and control in Barombong district produced three indicators studied at 5 locations being in the good category. So there is a need to improve aspects of communication and coordination with the Gowa Regency regional government to further optimize the implementation of the Village Response Control and Climate Change program in achieving the target of disaster ratio index reaching 0 all neighbourhoods.

Keywords: *Climate Change; Sustainable Development Goals; Resilience; Village Government*

MOTTO

“Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan kerjakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok”

– *HR.Ibnu Asakir*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tesis ini kepada Ibuku yang telah merawat dan membesarkanku Ibu Herlina terima kasih telah menyayangiku, memberikan dukungan dan kasih sayang yang tidak bisa kunilai dengan harta benda yang ada di dunia ini, dan kepada Bapak Jumasang yang telah menemaniku dalam susah dan senang, dan selalu memberikan dukungan penuh dalam menggapai setiap keinginan dan cita-citaku.

Tesis ini juga kupersembahkan kepada orang-orang terdekat, sahabat, teman, seluruh keluarga dan segenap pemerintah Kecamatan Barombong yang telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya yang begitu besar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin... Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Salam dan shalawat tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan harapan dengan penuh perjuangan dan kebanggaan yang berjudul **“Evaluasi Program Percepatan Pencapaian Tujuan Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan Iklim Di Kabupaten Gowa”**.

Tesis yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Magister (S2) pada Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Kedua Orang Tua yang telah menemani dalam susah dan senang, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan cinta yang tulus. Semoga apa yang diberikan kepada penulis bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Dan kepada keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya hingga penulis bisa selesai dengan baik.

Ucapan terimakasih banyak kepada Dosen Pembimbing I yaitu Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si dan Dosen Pembimbing II yaitu Bapak Dr.

Burhnuddin, M.Si yang telah memberikan saran dan kritik serta motivasi dan selalu senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Tesis ini selesai dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan, dan dukungan mengingat masih kurangnya kemampuan dan pengetahuan dari penulis. Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan, dukungan, semangat, bimbingan, dan saran-saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Terimakasih yang sedalam-dalamnya begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak yang disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr.Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, ST., MT.,IPU. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan para pembantu Rektor serta seluruh jajarannya yang senantiasa mencurahkan dedikasinya dengan penuh keikhlasan dalam rangka mengembangkan mutu dan kualitas Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku ketua jurusan Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas muhammadiyah Makassar.
4. Bapak/ibu dosen serta seluruh staf pengajar program Studi Magister Administrasi Publik yang telah memberikan banyak pendidikan dan

pelajaran serta ilmunya. Selain itu juga penulis ucapkan terima kasih pada bagian Tata Usaha Program Pascasarjana Studi Magister Administrasi Publik yang telah sedemikian banyak membantu berbagai proses hingga tesis ini selesai. Tak lupa pula penulis juga ucapkan banyak terimakasih kepada kelima Desa yang ada di Kec.Barombong yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti dan memperoleh data yang diperlukan selama penulis meneliti.

5. Teman-teman angkatan 2022 Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Publik

6. Terimakasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan tesis ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan tesis ini. Mudah-mudahan tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, 15 Agustus 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Teori dan Konsep	18
1. Konsep Evaluasi Program	18
2. Tujuan Evaluasi Program	21
3. Tipe-Tipe Evaluasi Program	23
4. Kriteria-Kriteria Evaluasi	24
5. Model-Model Evaluasi.....	26
6. Sustainable Development Goals (SDGS Desa)	38
7. Dari SDGs Ke SDGs Desa	41

8. Konsep Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan Iklim....	43
C. Kerangka Pikir.....	48
D. Fokus Penelitian.....	50
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Waktu dan Lokasi.....	55
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	55
C. Teknik Pengumpulan data.....	56
D. Teknik analisis data.....	59
E. Defenisi Operasional.....	61
F. Metode Analisis Data.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
B. Hasil Penelitian.....	78
C. Pembahasan.....	133
BAB V PENUTUP.....	144
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA.....	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hasil Analisis VOS (Viewer Of Science)	10
Gambar 2.2 18 Tujuan SDGs Desa	38
Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pikir Penelitian.....	49
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Gowa	70
Gambar 4.2 Peta Administrasi Kec.Barombong.....	73
Gambar 4.3 Peta Iklim Kabupaten Gowa.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Mapping Literatur	12
Tabel 3.1	Aspek dan Indikator Penerapan dan Hasil Evaluasi Model CIPP.....	62
Tabel 3.2	Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Efektifitas dari evaluasi model CIPP	64
Tabel 4.1	Rencana Aksi Daerah Kabupaten Gowa.....	74
Tabel 4.2	Data Kejadian Bencana Tahun 2023 Kec Barombong.....	76
Tabel 4.3	Capaian SDGs ke 13 Kecamatan Barombong.....	77
Tabel 4.4	Tujuan SDGs ke 13	78
Tabel 4.5	Jenis bencana yang terjadi tahun 2023.....	89
Tabel 4.6	Dana Desa Terkait Penanggulangan Bencana	93
Tabel 4.7	Data pelatihan penanggulangan bencana.....	96
Tabel 4.8	Sarana dan Prasarana	102
Tabel 4.9	Standar Operasional Prosedur (SOP).....	106
Tabel 4.10	Jumlah Tim Satgas Bencana	114
Tabel 4.11	Deskriptif Karakteristik Responden	125
Tabel 4.12	Analisis deskriptif berdasarkan indikator tujuan dan indikator yang jelas (X1)	126
Tabel 4.13	Analisis deskriptif berdasarkan Indikator keterlibatan stakeholder (X2).....	128
Tabel 4.14	Analisis deskriptif berdasarkan indikator sumber daya dan kapasitas (X3).....	129
Tabel 4.15	Analisis Deskriptif berdasarkan Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Efektifitas	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi agenda pembangunan global dimana didalamnya terdapat 17 Tujuan dan terbagi ke dalam 169 target yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. SDGs Desa mengajukan 18 tujuan yang merujuk pada adaptasi lokalitas berbeda dengan SDGs global yang hanya memiliki 17 tujuan. SDGs Desa berlandaskan pada urgensi pembangunan berkelanjutan di seluruh Dunia, Hampir seluruh masyarakat global mengakui bahwa mereka mempunyai tujuan yang sama terhadap pembangunan, Indonesia dengan ini berkomitmen untuk mencapai target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/ TPB).

Salah satu bentuk penerapan dari komitmen yaitu dengan menerbitkan regulasi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diatur dalam Perpres 111 Tahun 2022, SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa (Azwar 2021). Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam merupakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dengan

tujuan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa serta Permendesa PDTT Nomor 67 Tahun 2023 tentang panduan Desa Peduli Lingkungan (Susanti, Rifardi, and Kadarisman 2021).

Sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa Dalam SDGs Desa Penganggulangan bencana merupakan salah satu isu yang diangkat dalam pembangunan Berkelanjutan tujuan ke 13 Desa Tanggap pengendalian dan perubahan iklim dengan tujuan untuk membantu pengurangan dampak perubahan iklim global, adaptif dan tanggap terhadap perubahan iklim, dengan adanya program-program yang bisa diterapkan oleh pemerintah desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penanggulangan bencana, merupakan tantangan bagi pembangunan yang tidak dapat dihindari pada berbagai daerah. Setiap daerah, berpotensi terjadi bencana sesuai dengan tipe dan karakteristik serta potensi alam maupun buatan yang ada di wilayahnya (Sj n.d.).

Target terhadap Desa Tanggap pengendalian dan perubahan iklim, Yang pertama Indeks ratio bencana (IRT) mencapai 0 diseluruh RT, kedua penanganan/mitigasi resiko bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT. Adapun jika dibandingkan dengan capaian masih jauh dari target karena realitanya di Kabupaten Gowa khususnya Kecamatan Barombong yang terdiri dari 5 Desa setiap tahunnya apalagi di musim hujan rawan terjadi bencana antara lain Banjir yang sering terjadi disetiap tahunnya di Desa Kanjilo, Desa

Tamanynyeleng, kedua desa itu rawan terjadi banjir apabila memasuki musim hujan karena memiliki wilayah/lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan Sungai yang ada sehingga apabila jumlah debit air meningkat maka terjadilah banjir dan penyebab lainnya yaitu jumlah perumahan yang semakin bertambah mengakibatkan penghambatan lajur air oleh karenanya Bencana yang terjadi karena adanya perubahan iklim ini cukup sulit untuk dicegah.

Saat ini menurut Ketua Pendamping Desa Kec.Barombong, Banyaknya bencana yang terjadi seperti Banjir, Angin puting beliung, Dan Kebakaran dengan penanganan yang belum Nampak sehingga bencana seperti banjir terjadi setiap musim hujan. Dari 5 Desa untuk program mitigasi/penanganan bencana masing-masing mulai memperlihatkan bentuk tanggap Bencana sejak tahun 2022 contoh Desa Kanjilo dan Desa Tinggimae, adapun kegiatannya yaitu pelatihan penanganan bencana banjir, Pengadaan pelampung, dan pengadaan alat pemadam kebakaran ringan. Ditahun 2023 Desa Biringala mengikuti dalam bentuk pelatihan tanggap bencana dan pengadaan rambu penanganan bencana (titik kumpul dan jalur evakuasi Desa), Begitupun untuk Desa Moncobalang.

Setiap Desa sudah seharusnya menanggapi hadirnya tujuan ke 13 dari SDGs Sebagai Desa Tanggap pengendalian perubahan iklim sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan, mitigasi/penanganan

bencana di Kabupaten Gowa yang kurang Nampak kehadirannya menjadi salah satu alasan untuk menganalisis Evaluasi program yang seharusnya dilaksanakan karena menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan Dana Desa dengan tujuan untuk menangani peluang terjadinya bencana di Kabupaten Gowa yang disebabkan oleh adanya perubahan iklim.

Setiap daerah memiliki rekomendasi program atau kegiatan penanganan resiko bencana yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, Namun, kerentanan resiko tersebut dapat dilakukan pencegahan dengan meningkatkan kapasitas adaptif (*adaptive capacity*) yaitu kemampuan kelompok masyarakat atau individu untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan (Boekoesoe and Maksum 2022). Salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperbanyak pengetahuan terkait dampak dan resiko perubahan iklim. Berdasarkan Sistem Informasi Desa atau SID Kemendes Rekomendasi Program yang muncul untuk kecamatan barombong yaitu , Sosialisasi tentang bencana di Desa, MOU dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Pelatihan kader tanggap bencana, Pembuatan jalur evakuasi bencana Desa, Pengadaan sarana tanggap darurat desa dan Penghijauan jalan lingkungan, Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, Dan pekarangan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kovic Salim et al. 2022) menganalisis serta identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan efektivitas implementasi Program KSB. analisis keefektifan program KSB dilakukan sebagai bentuk upaya peningkatan kapasitas adaptif berdasarkan faktor-faktor yang sudah ditentukan serta upaya-upaya peningkatan yang dianggap perlu untuk dilakukan. Kemudian dalam penelitian (Leontinus 2022) Peningkatan pertahanan terhadap Bencana dan Iklim dapat dilakukan dengan penguatan konvergensi antara pengurangan resiko kebencanaan dan adaptasinya terhadap perubahan iklim, melalui strategi penanggulangan kebencanaan dan meningkatkan ketahanan iklim.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Fauzy, Chabib, and Putra 2019) Pemerintah merupakan Aktor utama dalam menyusun kebijakan dalam rangka penanggulangan bencana. Upaya-upaya akan tertuang dalam dokumen Rencana aksi nasional TPB (RAN TPB). (Luqmania et al. 2022) Beberapa pihak yang terlibat dalam penanganan permasalahan lingkungan yaitu pemerintah, perusahaan atau swasta, Universitas, media, dan masyarakat. Proses penanganannya dilakukan dengan membangun kesadaran bersama, mengikuti kajian dan aksi-aksi bersama, serta melakukan evaluasi dan monitoring bersama. Keterlibatan para pemangku kepentingan terhadap proses penanganan masalah lingkungan menjadi hal yang penting. Terakhir dalam penelitian (Malihah 2022) Perlu adanya kerjasama sesama

pemangku kepentingan dengan seluruh masyarakat, agar supaya visi dan misi serta tujuan untuk menangani pemanasan global dan pembangunan yang berkelanjutan dapat dilaksanakan sesuai dengan target.

Penelitian-penelitian terdahulu sudah cukup banyak yang telah melakukan penelitian terkait Desa Tanggap pengendalian dan perubahan iklim tentunya penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, dimana perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi penelitian, metode, variabel dan tahun penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di kec. Barombong Kab. Gowa yang tentunya belum pernah dilaksanakan penelitian serupa pada lokasi ini, kemudian metode pendekatan penelitian pada penelitian ini kualitatif dan kuantitatif. Adapun variabel yaitu evaluasi Penanganan/mitigasi resiko bencana dengan melihat sejauh mana penerapan program-program dimana hal ini belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Terakhir tahun penelitian dimana rentan tahun antara 2019-2022 sedangkan penelitian ini pada tahun 2024.

Untuk mengetahui ketercapaian tujuan dari suatu program perlu mengadakan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari pelaksanaan program kegiatan (Adellia and Prajawinanti 2021). Model CIPP merupakan model evaluasi yang banyak digunakan oleh evaluator. Model CIPP ini kemukakan oleh Stufflebeam di *Ohio State University*. CIPP adalah singkatan dari (*Contex, Input, Process,*

Product Evaluation). Adapun Keunikan yaitu pada tipe evaluasi tersebut berkaitan pada para pengambil keputusan (*decision*) yang terkait dengan operasional dan perencanaan suatu program. Keunggulan model ini memberikan sebuah format evaluasi yang lengkap pada setiap tahapan evaluasinya yaitu tahap konteks, masukan, proses, dan produk (Arifin 2016).

Penelitian ini memiliki *urgensi* untuk memperbaiki tatanan lingkungan dengan mengantisipasi kemungkinan terjadinya perubahan iklim, bentuk antisipasi dilakukan dengan menerapkan program-program yang telah direkomendasikan untuk setiap daerah untuk itu perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana program tersebut memberikan pengaruh terhadap pengendalian perubahan iklim.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil penerapan evaluasi model CIPP Pada Program Desa Tanggap Pengendalian dan perubahan Iklim di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana efektifitas Pelaksanaan Program Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan Iklim di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan

1. Untuk Mengetahui hasil penerapan evaluasi model CIPP Pada Program Desa Tanggap Pengendalian dan perubahan Iklim di Kabupaten Gowa

2. Untuk mengetahui efektifitas dari pelaksanaan Program Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan Iklim di Kabupaten Gowa

D. Manfaat Penelitian

Mengingat tujuan penelitian yang telah dikemukakan, manfaat dari penelitian ini diharapkan bahwa :

1. Manfaat teoritis

Sustainable Development Goals Desa merupakan pembangunan global yang mencakup berbagai tujuan dan target pembangunan, terdapat 18 tujuan dan 169 target salah satu tujuannya dalam penelitian ini yaitu pada Goals ke 13 Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan Iklim, berbagai teori yang mendukung untuk melakukan evaluasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah maupun masyarakat dapat bersinergi memperbaiki ataupun mencapai target Desa Tanggap pengendalian dan perubahan iklim.

2. Manfaat praktis

a. Untuk daerah setempat

Hal ini dapat diandalkan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana pengaruh program yang dilaksanakan pemerintah dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

b. Untuk otoritas publik

Adanya penelitian ini sekiranya bisa menambah wawasan ataupun memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya penanganan/mitigasi bencana di desa yang merupakan Goals ke 13 menjadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan mulai dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah desa.



Berdasarkan hasil analisis VOS (*Viewer Of Science*) dengan kata kunci *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengungkapkan beberapa tema penelitian yang secara konsisten muncul. Pertama, tema yang paling sering muncul adalah “*sustainable development*” menandakan bahwa penelitian terkait pembangunan berkelanjutan merupakan fokus utama. Pembangunan berkelanjutan mencakup tujuan pembangunan global dan target yang harus dicapai oleh pemerintah (Rane 2023), (Leal Filho et al. 2019), (He et al. 2020), (Dai and Menhas 2020), (Carlsen and Bruggemann 2022) (Ng 2020) and *Climate change* oleh (Newell et al. 2019), (Fuso Nerini et al. 2019), (Basuki et al. 2022), (Franco and Borrás 2019), (Streimikis and Baležentis 2020) (Morton, Pencheon, and Bickler 2019) memiliki keterkaitan antara tujuan pembangunan berkelanjutan dengan indikator penilaian ketercapaian tujuan yaitu penanganan perubahan iklim namun pada beberapa penelitian yang telah dilaksanakan terkait dengan pencapaian tujuan SDGs masih kurang yang membahas terkait evaluasi dari program yang menjadi bagian dari SDGs. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah suatu program berjalan dengan baik dan bisa memberikan dampak atau tidak.

Selain itu analisis juga menunjukkan tema-tema yang memiliki banyak keterkaitan dengan tema lainnya. “SDGs” menjadi tema yang paling banyak tertaut dengan tema lain menandakan SDGs dengan 17 tujuannya dan berbagai target capaian menjadi pusat perhatian

pemerintah secara global yang harus dicapai untuk pembangunan yang lebih baik kedepannya. “*Governance*” adalah tema yang juga memiliki banyak keterkaitan yang signifikan, menunjukkan bahwa pentingnya sistematisa atau cara mengelola urusan-urusan public yang baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Terakhir, “*Public Health*” yang secara tidak langsung berkaitan dengan fokus utama penelitian dimana kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas Sumber daya manusia. Keseluruhan analisis *Vos viewer* memberikan gambaran yang saling berkaitan dengan tema-tema kunci dan apa yang menjadi tujuannya yaitu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penting untuk mengamati proses maupun hasil temuan dari penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan bisa menjadi acuan untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Mapping Literatur

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Desain Penelitian	Hasil/Temuan
1	Kovic Salim, Dara Pristina, Samuel Christian, Angrenggani Pramitasari	Evaluasi Efektivitas Program Kampung Siaga Bencana (KSB)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis	Hasil penelitian mengatakan bahwa hasil evaluasi pada suatu program sangat bermanfaat untuk

	(Tahun 2022)	Pegangsaan Dua : Studi Kasus Rw 03	deskriptif kualitatif.	melihat sejauh mana program tersebut berdampak baik terutama bagi program KSB Pegangsaan Dua dimana didapatkan hasil bahwa KSB Pegangsaan Dua belum efektif. dimulai dari saat sebelum terjadi bencana masih terdapat kekurangan sarana prasarana yang dibutuhkan, gardu sosial yang jauh, dan kurangnya pemahaman kebencanaan kepada masyarakat.
2	Lola Malihah (Tahun 2022)	Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan	Metode penelitian yang digunakan adalah	Hasil penelitian menyatakan bahwa Kerusakan pada lingkungan menjadi isu yang

		<p>Iklīm Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan</p>	<p>literature riview.</p>	<p>paling sering dibincangkan pada Negara-negara di dunia. Pemanasan global dan Perubahan iklim adalah kondisi yang menandakan kerusakan tersebut. Upaya-upaya dan kebijakan yang diterapkan beberapa negara bertujuan untuk mengurangi dampak tersebut. Di tingkat internasional, beberapa negara sudah menjalankan kebijakan tersebut, hal ini sesuai dengan tujuan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	Akhmad Fauzy, Lutfi Chabib, Anggara Setyabawana Putra (Tahun 2019)	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Penanggulangan Bencana	Metode yang digunakan yaitu telaah dokumen dan survei secara online.	Hasil penelitian dikatakan bahwa TPB dimaksudkan untuk memberikan gambaran-gambaran terhadap sektor strategis pada pembangunan. Tentunya menjadi sasaran dengan memperhatikan sumber daya ataupun potensi yang ada di setiap wilayah. Masing-masing wilayah memiliki karakter fisik dan sosial yang berbeda.
4	Dewi Luqmania, Anjumiz Sunani, Afifah Septiani, Febi Agus Dwi Riyanto,	MAS KLIMIS (Masyarakat Peduli Iklim Yang Harmonis) Kendaraan Pt Pjb Up Gresik Dalam	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menyatakan bahwa Berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR PT PJB UP

	<p>Meilanny Budiarti Santoso,Santoso Tri Raharjo (Tahun 2022)</p>	<p>Mewujudkan Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)</p>	<p>Gresik, sebagai pihak industri melalui Program MAS KLIMIS (Masyarakat Peduli Iklim yang Harmonis) merupakan salah satu upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Program tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan seperti, membangun kesadaran bersama, melakukan kajian serta aksi bersama, serta melakukan monitoring dan evaluasi bersama untuk membangun kemandirian masyarakat. Demikian pula</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				keikutsertaan para pemangku kepentingan dalam proses menangani isu lingkungan menjadi hal yang penting untuk mencapai tujuan bersama.
5	Gindo Leontinus R. Siringoringo (Tahun 2022)	Program Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terhadap Masalah Perubahan Iklim Di Indonesia	Menggunakan Metode studi kasus dimana pada metode ini terdapat suatu rangkaian kegiatan ilmiah secara intens, terperinci dan berusaha medalami suatu program.	Hasil penelitiannya yaitu Paradigma SDGs memasukkan nilai-nilai ekonomi, sosial, dan ekologi serta links ataupun irisan ke 3 aspek tersebut (ekonomi, sosial, dan lingkungan). Perubahan iklim merupakan proses fisis, tapi perlu dipahami juga secara sosial ekonomi. Fenomena perubahan iklim

				yang datang takterduga dapat saja merusak hasil yang telah dicapai dan memberikan hambatan pencapaian tujuan pembangunan.
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Teori dan Konsep

a. Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari suatu kebijakan publik yang merupakan unsur penting dalam siklus kebijakan, sama pentingnya dengan formulasi, dan implementasi kebijakan. Oleh sebabnya kebijakan publik yang memiliki kualitas hanya bisa tercapai jika siklus itu mendapat perhatian. Jika ada kebijakan yang kemudian dievaluasi, maka itu adalah hal yang biasa dan tentu menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki atau menyempurnakan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan Sebagai sebuah siklus, maka evaluasi kebijakan merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oleh karenanya Dye (1987:45) dalam (Muhiddin 2017) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan sebagai pemeriksaan

yang objektif, sistimatis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

Charles O. Jones (1984), evaluasi merupakan kegiatan dengan tujuan untuk menilai manfaat kebijakan. Secara manajerial, evaluasi adalah bentuk usaha untuk mengukur dan menilai secara objektif terhadap pencapaian hasil yang sudah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, melalui evaluasi diharapkan setiap program bisa terlaksana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dibuktikan secara objektif tingkat keberhasilan, manfaat dan efisiensi pelaksanaannya (Awan Y. Abdoellah n.d.)

Suatu kebijakan publik tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kebijakan perlu pengawasan dengan salah satu mekanisme pengawasannya disebut evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk memberikan penilaian sejauh mana tingkat efektifitas kebijakan publik untuk dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara kenyataan dan harapan.

Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*impacts*), akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan. Dengan kata lain, evaluasi dapat pula digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah

dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis/pelaksanaan (*guide lines*) yang telah ditentukan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan publik. dibedakan dalam dua macam tipe. Pertama, tipe evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) merupakan iset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Kedua, tipe evaluasi proses (*process of public policy implemantation*), yaitu riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian antara proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk yang telah ditetapkan (Mustari 2015)

Evaluasi yaitu cara pembuktian keberhasilan ataupun sebaliknya dari pelaksanaan suatu program, oleh karenanya Definisi evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan pengelolaan program yang memuat tahapan siklus yaitu:

- 1) Evaluasi pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan prioritas dari berbagai alternative dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
- 2) Evaluasi pada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

3) Evaluasi pada tahap Pasca Pelaksanaan. Pada tahap pasca pelaksanaan evaluasi ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai relevansi (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dibandingkan keluaran), kemanfaatan (dampak dibandingkan hasil), dan keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran) dari suatu program. Hubungan ketiga tahapan tersebut sangat erat, selanjutnya terdapat perbedaan metodologi antara evaluasi program yang berfokus kerangka anggaran dengan yang berfokus pada kerangka regulasi. Evaluasi program yang berfokus pada anggaran dilakukan dengan dua cara yaitu: Penilaian indikator kinerja program berdasarkan keluaran dan hasil dan studi evaluasi program berdasarkan dampak yang timbul.

b. Tujuan Evaluasi Program

Program bisa diartikan sebagai suatu unit kegiatan yang merupakan implementasi atau realisasi dari kebijakan, berlangsung pada proses yang memiliki kesinambungan yang terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok masyarakat/orang (Muh. Fryal Akbar, S.IP. and Widya Kurniati Mohi, S.IP . 2018) Dengan

demikian hal-hal yang harus ditekankan pada program terdapat 3 hal penting yaitu sebagai berikut.

- a) Program merupakan *realisation* atau *implementation* dari sebuah kebijakan.
- b) Terjadi pada waktu yang lama dan bukan kegiatan yang tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
- c) Terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang.

Tujuan evaluasi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang” Lebih lanjut bahwa dimensi utama evaluasi diarahkan kepada hasil, manfaat, dan dampak dari program. Pada prinsipnya yang perlu dibuat perangkat evaluasi yang dapat diukur melalui empat dimensi yaitu : indikator masukan (*input*), Proses (*process*), keluaran (*output*), indikator dampak atau (*outcame*).

Tujuan secara khusus pada Evaluasi Program terdapat enam tujuan, yaitu sebagai berikut:

- a) Memberi masukan pada perencanaan suatu program
- b) Menyediakan masukan bagi pengambil keputusan yang memiliki kaitan dengan tindak lanjut penghentian program

- c) Memberi masukan untuk pengambil keputusan terkait modifikasi atau perbaikan program
- d) Memberi masukan yang berkenaan dengan faktor penghambat maupun faktor pendukung program
- e) Memberi masukan untuk kegiatan yang motivasi dan membina (pengawasan, supervisi dan monitoring) bagi penyelenggara ataupun pengelola serta pelaksananya.
- f) Menyajikan data terkait landasan pengetahuan bagi evaluasi program.

c. Tipe-tipe Evaluasi

Anderson membagi 4 kebijakan dalam 3 tipe. Pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Melihat apakah suatu kebijakan dapat memberi manfaat atau dampak pada kepentingan. Tipe kedua yaitu tipe evaluasi yang berfokus pada kinerja kebijakan ataupun program program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berdasar pada pertanyaan pertanyaan mendasar terkait : Apakah suatu program dilaksanakan dengan seharusnya ? Siapa yang menerima manfaatnya ?, Apakah terdapat hubungan dengan program lain ? Apakah ukuran dasar prosedur diikuti ? Dengan menggunakan pertanyaan pertanyaan seperti ini dalam implementasi evaluasi dan berfokus pada bekerjanya kebijakan atau program, maka evaluasi tipe ini akan lebih membincangkan

sesuatu mengenai efisiensi ataupun kejujuran dalam pelaksanaan program.

ketiga yaitu tipe evaluasi sistimatis, tipe ini memandang secara objektif program atau kebijakan yang dilaksanakan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat serta melihat sejauhmana tujuan-tujuan tersebut tercapai. Para pengambil keputusan program melakukan evaluasi untuk penundaan dalam mengambil keputusan, untuk membenarkan, dan memberikan kebasahan atas keputusan-keputusan yang sudah dibuat, untuk membebaskan diri dari kontraversi dengan tujuan-tujuan dimasa mendatang dengan mengelakkan tanggungjawab, mempertahankan program dalam pandangan pemilihnya, pemberi dana, atau masyarakat, atau untuk memenuhi syarat-syarat pemerintah atau yayasan untuk ritual evaluasi. Selain itu evaluasi digunakan untuk tujuan politik tertentu.

d. Kriteria-kriteria Evaluasi

Dalam Implementasi evaluasi kebijakan menggunakan kriteria yang umum yang dimaksudkan bisa memberikan arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dunn dalam (Mustari 2015) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

- a) *Efektifitas*, berkaitan atas apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
- b) *Efisiensi*, berkaitan atas jumlah usaha yang dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. *Efisiensi* yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah hubungan antara efektifitas dan usaha terakhir yang umumnya dilihat dari nilai moneterinya.
- c) Kecukupan, berkaitan pada seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan suatu masalah. Kriteria kecukupan menekankan atas kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
- d) Kesamaan, erat kaitannya dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok berbeda dalam masyarakat. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran untuk mendistribusikan resources dalam masyarakat.
- e) *Responsivitas*, berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan dapat memberikan kepuasan akan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Aspek *efektifitas*, *efisiensi*, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi

kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya mendapatkan keuntungan dari adanya suatu kebijakan.

- f) Ketepatan, yaitu kriteria secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak ada hubungannya dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama- sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

e. Model-Model Evaluasi

1. Model CIPP (*context, input, proses and producty*) Stufflebeam (Tayibnapis, 2008) mengertiakan evaluasi sebagai proses menggambarkan ,memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternative keputusan, karena itu ia membagi evaluasi menjadi empat macam, yaitu :

a) *Context evaluation to serve planning decision* yang berkaitan dengan tujuan program, Tujuan Program, Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat , Dukungan kebijakan dan konteks lingkungan program.

b) *Input evaluation structuring decision* yang berkaitan dengan sumberdaya, dan sarana prasarana untuk mencapai tujuan;

- c) *Process evaluation to serve implementing decision*, yang berkaitan dengan proses untuk Pelaksanaan kegiatan, Manajemen program dan Partisipasi Masyarakat
- d) *Product evaluation to serve recycling decision*, yang berkaitan dengan pencapaian tujuan program dan dampak yang diberikan.

Tentang hal ini, lebih lanjut Sutopo (2002) menyatakan bahwa :

- a) *Context*, berkaitan dengan beberapa faktor dan kondisi sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - b) *Input*, adalah masukan yang diberikan sebagai persiapan sebelum pelaksanaan program;
 - c) *Process*, yaitu program dilaksanakan sejak awalnya dengan pendekatan sesuai konteksnya, dan merupakan proses yang tetap untuk tercapainya tujuan;
 - d) *Product*, yaitu kualitas hasil kegiatan yang dapat dicapai.
2. Evaluasi Model UCLA Hampir sama dengan CIPP, Alkin (1969) menyampaikan lima macam evaluasi, yaitu , :
- a) *System Assessment*, yang berkaitan dengan keadaan atau posisi system;
 - b) *Programme Planning*, membantu pemilihan program;
 - c) *Programme Implementation*, yang memberikan informasi tentang seberapa jauh program telah dikenalkan;

- d) *Programme Improvement*, yaitu memberikan informasi tentang seberapa jauh program telah berfungsi dan telah dilaksanakan;
 - e) *Programme Certification*, yang memberikan informasi tentang nilai atau guna kegiatan.
3. Model Beinkerhoff Brinkerhoff (1983) mengemukakan tiga golongan evaluasi yaitu :
- a) *Fixed and Emergent Evaluation*, yang berkaitan tetap atau perkembangan ancangan evaluasi, masalah dan kriteria evaluasi dan seberapa jauh akhirnya dipertemukan;
 - b) *Formative vs summative Evaluation*, yang berkaitan dengan kebutuhan dan kegunaan evaluasi;
 - c) *Experimental and quasi-Experimental Design vs Natural/Unobtrusive Inquiry*, yang berkaitan dengan proses intervensi, manipulasi.
4. Model Stake atau Model Countenance Stake (1967) menekankan dua dasar evaluasi, yaitu description dan judgment serta adanya tiap tahap program. Yaitu : *Antecedents (context)*, *Transaction (proses)* *Outcomes (output)*. disamping itu, ia menekankan pentingnya perbandingan yang relative, (antara suatu program dengan yang lainnya) dan perbandingan yang bau (antara program ditawarkan dengan yang sudah dibakukan)

5. Model Helmut Wollman (2007) Menurut Wollman (2007:393) terdapat 3 tipe evaluasi kebijakan yaitu *Ex ante evaluation*, *Ongoing evaluation* dan *Ex-post evaluation*.

a) *Ex-ante evaluation*. Adalah evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan. Secara hipotetik evaluasi tipe ini ditujukan untuk mengantisipasi dan memberikan penilaian awal tentang perkiraan efek atau dampak serta konsekuensi dari kebijakan yang direncanakan atau telah ditetapkan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan atau dengan proses pembuatan kebijakan yang sedang berjalan. *Ex-ante evaluation* adalah instrumen penting dari penentuan pilihan dari berbagai opsi kebijakan yang ada. Evaluasi tipe ini juga memberikan analisa dampak terhadap lingkungan kebijakan.

b) *Ongoing Evaluation*, Mengidentifikasi dan mengukur dampak dan hasil dari program yang sedang berjalan. Esensi dari *Ongoing evaluation* adalah untuk memberikan informasi yang relevan, kembali pada proses implementasi kebijakan, terutama pada tahapan tertentu dari implelementasi kebijakan saat informasi tersebut dapat dipergunakan untuk memperbaiki, revisi, "meluruskan" kembali proses implelementasi kebijakan ke arah yang sesungguhnya ingin dicapai.

c) *Ex-post evaluation*. Menurut Wollman ini merupakan varian klasik dari evaluasi kebijakan. Evaluasi ini ditujukan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Ini juga merupakan evaluasi hasil kebijakan.

6. Model William N. Dunn (1990) Menurut Dunn dalam Nugroho (2014 :728) kemudian, evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisa kebijakan, yaitu sebagai berikut:

a) Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu tentang seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya perbaikan kesehatan) dan target tertentu telah dicapai.

b) Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuandan sasaran, analis dapat menguji alternatif sumber nilai (kelompok kepentingan, pegawai negeri, dan kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka dalam berbagai

bentuk rasionalitas (teknis, ekonomid, legal sosial dan substantif).

- c) Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, terutama bagi “perumusan masalah” dan “rekomendasi”. Informasi tentang memadai atau tidaknya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan bagi pada perumusan ulang masalah kebijakan. Dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan. Evaluasi juga dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Menurut Dunn kemudian, evaluasi kebijakan mempunyai dua aspek yang paling berhubungan, yaitu penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik dan program dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil. Dunn selanjutnya membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga berdasarkan waktu evaluasi, yaitu “sebelum dilaksanakan”, “pada waktu dilaksanakan” dan “sesudah dilaksanakan”. Evaluasi pada waktu pelaksanaan umumnya disebut pula sebagai evaluasi proses, sementara evaluasi setelah kebijakan diimplementasikan, disebut sebagai evaluasi

konsekuensi (*output*) kebijakan atau evaluasi dampak pengaruh (*outcome*) kebijakan, atau disebut juga sebagai evaluasi sumatif.

7. Model Lester dan Steward, Jr (2000) Lester dan Steward mengkategorisasi evaluasi kebijakan menjadi empat tipe. Adapun tipe atau model yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a) Evaluasi Proses. Evaluasi yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan.
- b) Evaluasi Dampak. Evaluasi yang berkaitan dengan hasil dan atau pengaruh dari implementasi kebijakan.
- c) Evaluasi Kebijakan. Evaluasi untuk menguji kesesuaian antara hasil kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai.
- d) Meta Evaluasi. evaluasi terhadap berbagai implementasi kebijakan yang ada, untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

8. Model Ernest R House (1980)

Ernest R House membuat teksonomi evaluasi yang cukup berbeda, yang membagi model evaluasi menjadi :

- a) Model Sistem, dengan indikator utama efisiensi
- b) Model Perilaku, dengan indikator utama adalah produktivitas dan akuntabilitas
- c) Model formulasi keputusan, dengan indikator utama adalah pilihan penggunaan dan manfaat sosial

- d) Model Tujuan Bebas (goal free) dengan indikator utama adalah pilihan penggunaan dan manfaat sosial.
- e) Model Kekritisan Seni (art criticism) dengan indikator utama adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat
- f) Model review profesional, dengan indikator utama adalah resolusi
- g) Model studi kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman atas diversitas.

Adapula pemilihan evaluasi sesuai dengan teknik evaluasinya, yaitu :

- 1) Evaluasi Komparatif, yaitu membandingkan implementasi kebijakan (proses dan hasilnya) dengan implementasi yang sama atau berlainan, di suatu tempat yang sama atau berlainan.
- 2) Evaluasi *Historikal*, yaitu membuat evaluasi kebijakan berdasarkan rentang sejarah munculnya kebijakan-kebijakan tersebut.
- 3) Evaluasi *laboratorium atau eksperimental*, yaitu evaluasi namun menggunakan eksperimen yang diletakkan dalam sejenis laboratorium.

- 4) Evaluasi *ad hock*, yaitu evaluasi yang dilakukan secara mendadak dalam waktu segera untuk mendapatkan gambar pada saat itu (*snap shot*)

9. Model James Anderson

James Anderson (2011:276-278) membagi evaluasi (implementasi) kebijakan public menjadi tiga. Tipe pertama, evaluasi kebijakan public yang dipahami sebagai kegiatan fungsional yang selalu melekat pada setiap kebijakan public, kedua evaluasi yang memfokuskan pada bekerja kebijakan, ketiga evaluasi sistematis untuk mengukur kebijakan atau mengukur pencapaian disbanding target yang ditetapkan

10. Model Jones

Secara umum menurut Jones (1984:199) evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan, menyangkut substansi, implementasi dan dampaknya. Menurut Jones (1985:355) kemudian bahwa evaluasi kebijakan dimaknai dari bagaimana evaluasi kebijakan itu dikategorikan dalam pemerintahan, yaitu mengarah kepada "program kepada pemerintah". Sementara itu program yang bersifat individual dikembalikan kepada pemerintah untuk pembahasan dan pertimbangan bagi pengembangan selanjutnya. Jones mengemukakan bahwa pada dasarnya evaluasi kebijakan dilaksanakan untuk 3 tujuan, yaitu:

a) *Political evaluation* (evaluasi bersifat politis). Dilakukan untuk melihat apakah program memberikan manfaat bagi negara. Dapatkah ini ditafsirkan untuk membuka peluang bagi re-election, untuk mendapatkan dukungan media, atau untuk mendapatkan sumbangan kampanye.

b) *Organizational evaluation* (evaluasi yang bersifat organisasional). Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban tentang apakah kebijakan atau program yang dilakukan, melahirkan dukungan bagi badan-badan pelaksana. Apakah manfaat bagi badan-badan tersebut melebihi biaya yang dikeluarkan. Apakah kebijakan yang dilakukan, mengarah pada perluasan lebih lanjut bagi badan-badan tersebut.

c) *Substantive evaluation* (evaluasi yang substantif atau bersifat nyata). Yaitu evaluasi yang dilakukan untuk melihat apakah kebijakan atau program yang dilakukan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik secara hukum maupun dalam detail kebijakan yang ingin dicapai selanjutnya, serta apa dampak kebijakan atau program tersebut bagi persoalan yang dituju.

11. Model Edward A Suchman Edward A Sucman di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah evaluasi kebijakan :

- a) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- b) Analisis Terhadap Masalah

- c) Deskripsi dan Standarisasi Kegiatan
- d) Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
- e) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat kegiatan tersebut atau karena penyebab lain
- f) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

12. Howlet dan Ramesh (1995)

Howlet dan Ramesh mengelompokkan evaluasi menjadi tiga, yaitu :

a) Evaluasi *administratif*, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif- anggaran, efesinsi, biaya dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan :

- 1) *Effort evaluation*, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan,
- 2) *Performance evaluation*, yang menilai keuaran (output) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan,
- 3) *Adequacy of performance evaluation* atau *effectiveness evaluation*, yang melalui apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan
- 4) *Effeiciency evaluation*, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut,
- 5) *Proses evaluations*, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program

- b) Evaluasi judicial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
- c) Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

13. Nugroho Merujuk pada Nugroho (2014:736)

Evaluasi kebijakan memiliki empat cakupan yaitu :

- a) Evaluasi formulasi/ perumusan kebijakan, adalah evaluasi yang bertujuan untuk menilai mengenai:
 - 1) Formulasi kebijakan apa yang digunakan? apakah formulasi kebijakan telah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak 17 diselesaikan?, mengingat setiap masalah publik memerlukan model formulasi kebijakan yang berlainan.
 - 2) Bagaimana prosedur formulasi kebijakannya? Apakah formulasi telah mengarah kepada permasalahan inti?
 - 3) Bagaimana pendayagunaan sumber daya yang ada?
- b) Evaluasi implementasi kebijakan, adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab pertanyaan:
 - 1) Bagaimana kinerja implementasi kebijakan?

2) Faktor apa saja sebagai kunci keberhasilan? Kebijakannya sendiri, organisasi pelaksana, dan lingkungan implementasi kebijakan.

c) Evaluasi kinerja kebijakan, penilaian kinerja menjadi isu penting dalam kebijakan publik, mengingat kebijakan dibuat untuk suatu tujuan. Karenanya kebijakan harus dinilai tingkat ketercapaiannya terhadap tujuan kebijakan yang diharapkan. Sesuai dengan Spitzer yang secara khusus mengemukakan bahwa penilaian kinerja merupakan kunci keberhasilan organisasi, karena menentukan apa yang harus dicapai oleh organisasi, sejauh mana pencapaian, dan apa yang belum dicapai.

d) Evaluasi lingkungan kebijakan, adalah evaluasi dengan tujuan untuk memberikan deskripsi yang lebih jelas bagaimana konteks kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan, evaluasi lingkungan kebijakan dapat terdiri dari evaluasi lingkungan formulasi kebijakan dan evaluasi.

f. Sustainable Development Goals (SDGS Desa)

Gambar 2.2 18 Tujuan SDGs Desa (Sumber: SID Kemendes)



SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Urgensinya yaitu guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Respon cepat pemerintah Indonesia dalam Implementasi SDGs Global dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Berkelanjutan. Merujuk pada Perpres Nomor 59 Tahun 2019, maka disusun SDGs Desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menyusun road map atau dokumen induk perencanaan desa yang bernama Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Di mana melalui Permendesa No. 13 Tahun 2020 tentang SDGs Desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menginstruksikan kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk menyusun dokumen perencanaan desa (RPJMDesa) dan dokumen penganggaran desa (APBDesa) dengan mempedomani SDGs Desa. Tujuannya agar pembangunan di level desa lebih terstruktur, sistematis dan mempunyai tolak ukur yang jelas (Afifuddin 2021).

Adapun SDG's Desa tersebut meliputi 18 indikator, yang terdiri dari: (1) Desa tanpa kemiskinan; (2) Desa tanpa kelaparan; (3) Desa sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan desa berkualitas; (5) Keterlibatan perempuan desa; (6) Desa layak air bersih dan

sanitasi; (7) Desa berenergi bersih dan terbarukan; (8) Pertumbuhan ekonomi desa merata; (9) Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; (10) Desa tanpa kesenjangan; (11) Kawasan permukiman desa aman dan nyaman; (12) Konsumsi dan Produksi desa sadar lingkungan; (13) Desa tanggap perubahan iklim; (14) Desa peduli lingkungan laut; (15) Desa peduli lingkungan darat; (16) Desa damai berkeadilan; (17) Kemitraan untuk pembangunan desa; dan (18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Dasar pemikiran munculnya SDGs 18 yaitu menghargai keberadaan bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam agama, budaya, bahasa, adat istiadat, serta menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan, bahkan berkembang (Kurniawan 2008)

Pencapaian tujuan dan sasaran SDGs Desa di atas, dilakukan dengan langkah berikut:

- a) Pemutakhiran data Desa berbasis SDGs Desa. Data Desa Berbasis SDGs Desa, merupakan data rinci berupa satu nama satu alamat warga dan keluarga, data wilayah terkecil level RT, dan data pembangunan Desa, yang dikumpulkan oleh kelompok kerja relawan pendataan Desa, data dikumpulkan, tersedia dan dimiliki oleh Desa, serta digunakan oleh Desa.

- b) Pengolahan data secara elektronik dan otomatis dalam Sistem Informasi Desa (SID) (dapat diakses di Pengolahan data sid.kemendes.go.id). ini menghasilkan rekomendasi rinci mengenai penanganan masalah pembangunan di Desa, termasuk penanganan bencana.
- c) Rekomendasi pembangunan penanganan menjadi acuan masalah dalam Musyawarah Desa perencanaan pembangunan Desa (Musyawarah Desa RPJM Desa dan RKP Desa).

g. Dari SDGs ke SDGs Desa

Kebijakan otonomi desa, selain memberikan wewenang kepada Pemerintah Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, ternyata juga mensyaratkan pada kemampuan Desa otonom untuk dapat membiayai pembangunan di desanya secara mandiri. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah desa harus dapat menggali sendiri sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya atau melakukan usaha-usaha lain seperti yang di atur dalam undang-undang. Untuk itu dibutuhkan sumberdaya aparat pemerintah desa yang mampu mengemban amanat tersebut, sehingga kemampuan dan kualitas manusianya juga sangat dibutuhkan (Siti Khoiriah 2022).

Pengaturan tentang otonomi Desa dimaksudkan untuk merespon proses globalisasi, yang ditandai oleh proses liberalisasi (informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lain-lain) dan

munculnya pemain-pemain ekonomi dalam skala global. Dampak globalisasi dan eksploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas, meskipun dengan otonomi yang memadai. Tantangan ini memerlukan institusi yang lebih kuat (dalam hal ini negara) untuk menghadapinya. Konsep pembangunan desa pada undang-undang desa serta kekurangan dari ukuran pembangunan desa (Indeks Pembangunan Desa/IPD dan Indeks Membangun Desa/IDM) sehingga posisi SDGs semakin penting karena selain sesuai dengan kebijakan pembangunan desa juga dibutuhkan untuk diimplementasikan ke desa sehingga peluang keberhasilan pencapaian SDGs pada satu desa menjadi maksimal. Pada tataran kebijakan, SDGs ini langsung ditempatkan pada Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagai acuan bagi desa untuk penyusunan kegiatan dan penganggaran tahunan masing-masing desa. Namun demikian, pada bagian ini penulis nampaknya masih perlu menjelaskan lagi secara lebih rinci mengenai proses perumusan kebijakan dan contoh implementasi peraturan tersebut sehingga lebih mudah dipahami secara teknis oleh desa. Penggunaan pilihan kata atau kalimat “tanpa banyak cincong, SDGs langsung ditempatkan pada Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi”. Dalam peraturan menteri tersebut mengatur bahwa pelokalan SDGs menjadi SDGs Desa tidak berlangsung dari atas kebawah tetapi

menyesuaikan SDGs agar sesuai konteks desa yang selama ini memberikan kekhususan dalam pembangunan.

h. Konsep Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan Iklim

SDGs Desa nomor 13 ini bertujuan untuk membantu pengurangan dampak perubahan iklim global, dengan beberapa program yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam kondisi tidak ada bencana, tindakan yang dilakukan Desa adalah pencegahan bencana dan mitigasi. Dalam situasi terdapat potensi bencana, Desa melakukan kesiapsiagaan bencana. Ketika terjadi bencana, yang perlu dilakukan Desa adalah upaya-upaya tanggap darurat. Terakhir, pasca kejadian bencana, dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi (Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia 2021).

a) Pencegahan Bencana dan Mitigasi (Situasi Tidak Ada Bencana)

Pencegahan bencana dilakukan dengan berbagai kegiatan sebagai upaya menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Sedangkan mitigasi dilakukan dengan berbagai upaya mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pencegahan dan mitigasi menjadi bagian atau diintegrasikan secara terpadu dalam: Kebijakan Desa (dalam bentuk peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa) Perencanaan Pembangunan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa), dan

penganggaran dalam APBD Desa, masuk dalam bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak.

b) Kesiapsiagaan (Situasi Terdapat Potensi Bencana)

- 1) Pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat
Pada beberapa wilayah di mana tidak dapat menerima peringatan dini bencana dari lembaga nasional, maka pengetahuan mengenai tanda-tanda/gejala alam akan terjadinya bencana menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Gejala alam tersebut dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bentuk peringatan dini berbasis masyarakat. Pengetahuan gejala alam dapat dikembangkan dari pengetahuan lokal yang sudah ada.
- 2) Penyusunan rencana evakuasi Jenis bencana tertentu mengharuskan warga meninggalkan tempat tinggal, bahkan Desanya. Desa dengan kerawanan bencana semacam ini harus memiliki rencana evakuasi untuk melindungi warganya. Petunjuk evakuasi juga perlu disiapkan dan dipahami seluruh masyarakat, di antaranya: titik kumpul, rute/jalur evakuasi, papan petunjuk dan lokasi evakuasi sementara.
- 3) Simulasi tanggap darurat Merupakan latihan memperagakan tindakan-tindakan yang diperlukan pada saat tanggap darurat dengan skenario seperti terjadi bencana yang sesungguhnya.

- 4) Penyusunan rencana kontinjensi Rencana kontinjensi adalah rencana yang didasarkan pada keadaan bencana yang kemungkinan besar akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi. Rencana kontinjensi disusun pada kondisi kesiapsiagaan bencana (situasi terdapat potensi bencana).
 - 5) Penyediaan Peralatan Tanggap Darurat Bencana Peralatan darurat perlu tersedia di Desa, sesuai dengan kerawanan bencana, seperti: tenda darurat, HT, genset, tandu, pelampung, alat selam, kompor serba guna, dan sebagainya.
 - 6) Pendataan Kerawanan Bencana Untuk menghadapi kejadian bencana, Desa perlu memiliki dan memastikan validitas data penduduk yang tinggal di lokasi rawan bencana, seperti di tebing, di tepian sungai, di tempat rawan kebakaran. Diperlukan pula data warga rentan untuk meminimalisir risiko bencana terhadap mereka. Data SDGs Desa telah mengakomodir kebutuhan ini. Desa perlu untuk terus melakukan pemutakhiran secara rutin.
- c) Tanggap Darurat (Saat Terjadi Bencana)
- 1) Pengaktifan rencana kontinjensi Dalam hal bencana terjadi, maka Rencana Kontinjensi diaktifkan oleh kepala Desa dan berubah menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat. Karenanya struktur komando tanggap darurat aktif untuk menjalankan tugasnya.

- 2) Melakukan evakuasi Struktur relawan desa mengoordinir masyarakat untuk melakukan evakuasi hingga ke titik kumpul dan lokasi pengungsian.
- 3) Pengamanan lokasi bencana dan pengungsian Lokasi bencana yang ditinggalkan warga rawan terjadi pencurian atau penjarahan. Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), aparat TNI/Polri dan masyarakat harus bekerja sama mengatur mekanisme pengamanan.
- 4) Pengelolaan Logistik Pengelolaan logistik yang baik didasarkan pada data korban yang akurat, untuk menjamin ketersediaan material serta distribusi yang adil dan merata kepada seluruh korban bencana. Pengelolaan logistik harus memiliki mekanisme untuk memprioritaskan kelompok rentan.
- 5) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa perlu memiliki kapasitas untuk melakukan pertolongan pertama pada korban bencana hingga korban bencana mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga Kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat.
- 6) Pelayanan dukungan psikososial Pelayanan dukungan psikologi dan sosial diperlukan bagi warga yang mengalami guncangan psikologi (trauma) akibat dampak negatif bencana yang dialaminya. Guncangan psikologi terutama dialami oleh kelompok rentan anak-anak, remaja, lansia dan perempuan.

i. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

Dalam konteks teori manajemen dan organisasi, ada beberapa teori yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas. Berdasarkan Teori Sistem Terbuka (*Open Systems Theory*):

- a) Indikator yang Jelas: Menurut teori ini, program harus memiliki tujuan dan indikator yang jelas untuk mengukur kinerja dan efektivitasnya. Indikator yang jelas membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan evaluasi kinerja.
- b) Keterlibatan *Stakeholder*: Program dipandang sebagai sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya. Keterlibatan stakeholder penting untuk mendapatkan masukan dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.
- c) Sumber Daya dan Kapasitas: Program membutuhkan sumber daya yang memadai (misalnya, finansial, manusia, teknologi) dan kapasitas yang cukup untuk menggunakan sumber daya tersebut secara efektif.

Menurut Hasibuan ada 3 faktor yang berpengaruh dalam efektivitas suatu program, yaitu:

- a) Kualitas aparatur, dimana menjelaskan bahwa kualitas SDM pada awalnya adalah tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang terdapat pada sumber daya manusia.

- b) Kompetensi administrator, Kemampuan ialah kapasitas individu dalam menjalankan berbagai tugas untuk pekerjaan tertentu.
- c) Pengawasan, yaitu Fungsi manajemen yang menjelaskan proses kegiatan dengan memastikan dan terjaminnya tujuan serta tugas untuk melaksanakan sebuah program sudah dijalankan dengan baik.

Selanjutnya menurut Suranto menjelaskan bahwasanya beberapa faktor bisa mempengaruhi efektivitas ialah terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Faktor internal, yaitu adanya Kerjasama yang didalam sebuah program tertentu. Baik diantara individu dengan individu ataupun individu dengan instansi. Hubungan simbiosis yang baik maka kesuksesan pencapaiannya akan lebih cepat.
- b) Faktor eksternal, yaitu sebuah hubungan pertukaran dengan beberapa Lembaga dan melibatkan diri dengan tujuan guna memperoleh dukungan, mengatasi hambatan. Maksudnya ialah berkaitan dengan hubungan dengan pihak luar yang berkaitan dengan keberhasilan untuk mencapai tujuan.

C. Kerangka Pikir

Dari banyaknya model evaluasi program, dalam penelitian Evaluasi Program Percepatan Pencapaian Tujuan Desa Tanggap Pengendalian Dan Perubahan Iklim peneliti menggunakan model

CIPP. Evaluasi dengan model CIPP tidak harus menunggu suatu program/produk selesai hasil dari evaluasi ini dapat membantu untuk mengembangkan program, sementara itu hasil evaluasi perlu didukung oleh bagaimana tingkat efektifitas dari evaluasi program terhadap Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan Iklim yang ada di Kabupaten Gowa, maka dibuatlah kerangka pikir sebagai berikut:

**Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pikir Penelitian
Evaluasi Program Percepatan Pencapaian Tujuan Desa Tanggap
Pengendalian Dan Perubahan Iklim Di Kab.Gowa**



Keterangan: Kualitatif : _____

Kuantitatif : - - - - -

D. Fokus Penelitian

Titik fokus penelitian ini yaitu untuk melakukan evaluasi terhadap rekomendasi program penanganan/ mitigasi bencana di Kec.Barombong dimana terdapat enam program yaitu Sosialisasi tentang bencana di Desa, MOU dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Pelatihan kader tanggap bencana, Pembuatan jalur evakuasi bencana Desa, Pengadaan sarana tanggap darurat desa dan Penghijauan jalan lingkungan, Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, Dan pekarangan Program ini dikaji berdasarkan *context, input, Process* dan *Product* Atau CIPP dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas program tersebut.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Penerapan evaluasi model CIPP pada program Desa Tanggap Pengendalian dan perubahan iklim
 - a) Evaluasi *Context*

Evaluasi yang akan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dan diidentifikasi disusunnya program-program dari hasil rekomendasi untuk kecamatan barombong yaitu Sosialisasi tentang bencana di Desa, MOU dengan BPBD Kabupaten, UPT KPH, DLH Kabupaten, Pelatihan kader tanggap bencana, Pembuatan jalur evakuasi bencana Desa,

Pengadaan sarana tanggap darurat desa serta Penghijauan jalan lingkungan, FASOS, FASUM, Dan pekarangan, adapun Komponennya yaitu:

- 1) Tujuan Program
 - 2) Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat
 - 3) Dukungan kebijakan
 - 4) Konteks lingkungan
- b) Evaluasi *input*

Evaluasi tahap masukan mengidentifikasi dari masalah-masalah Sumber daya dan peluang yang bisa membantu pengambil keputusan untuk mendefinisikan tujuan, prioritas, dan membantu kelompok-kelompok lebih luas untuk menilai tujuan, prioritas, dan manfaat dari ke enam program tersebut. Komponen input mencakup indikator:

- 1) Sumber Daya Manusia (Materi Pelatihan, jenis Kegiatan)
 - 2) Sumber Daya Finansial/Anggaran
 - 3) Sarana Dan Prasarana
- c) Evaluasi *Process*

Evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan aktivitas dari program yang dilaksanakan. Setiap program memiliki struktur perencanaan yang berbeda-beda dan tentunya proses yang dilaksanakan harus sesuai aturan atau

rencana kerja yang berlaku khususnya pada penerapan enam program di kecamatan barombong. Komponen-komponen tahap ini mencakup indikator:

- 1) Pelaksanaan kegiatan
- 2) Manajemen program
- 3) Partisipasi masyarakat
- d) Evaluasi *Product*

Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil dari evaluasi ini akan menggambarkan atau mengukur kesuksesan dalam mencapai kebutuhan-kebutuhan yang ditargetkan. Program mitigasi/penanganan bencana yang ada di Kab.Gowa tentunya memiliki tujuan yang sama yaitu menangani bencana baik yang belum terjadi sebagai bentuk antisipasi maupun yang memang sudah terjadi setiap tahunnya di daerah ini:

- 1) Pencapaian Tujuan program
- 2) Dampak jangka pendek
- 3) Dampak jangka panjang

Hasil evaluasi atau proses pengambilan kesimpulan setelah adanya penerapan dari model CIPP terkait program Desa

Tanggap pengendalian dan perubahan iklim di Kec.Barombong, berhasil atau tidaknya suatu program ditentukan dari tercapai atau tidaknya suatu tujuan dari program tersebut yang dapat dilihat dari hasil penerapan evaluasi melalui Model CIPP yang dilakukan oleh peneliti sebagai proses mendapatkan, memperoleh dan menyediakan informasi untuk lebih fokus pada informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan.

2. Efektifitas dari pelaksanaan program Desa Tanggap Pengendalian dan perubahan iklim

Mengukur efektivitas pelaksanaan program, termasuk program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim, memerlukan pendekatan multidimensional. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi dan digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program adalah:

1. Tujuan dan Indikator yang Jelas

- 1) Tujuan yang Terdefinisi: Program harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan ini harus dapat diukur dan realistis, sehingga keberhasilan program dapat dinilai secara objektif.
- 2) Indikator Kinerja: Indikator kinerja yang terukur (KPIs) harus ditetapkan di awal program. KPIs ini dapat mencakup aspek seperti peningkatan kesadaran lingkungan, atau peningkatan ketahanan pangan.

2. Keterlibatan *Stakeholder*

- 1) Partisipasi Aktif: Tingkat keterlibatan dan partisipasi aktif dari berbagai stakeholder, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, LSM, dan sektor swasta, sangat penting.
- 2) Komunikasi dan Koordinasi: Komunikasi yang efektif dan koordinasi antar stakeholder memastikan bahwa semua pihak memahami peran mereka dan bekerja menuju tujuan yang sama.

3. Sumber Daya dan Kapasitas

- 1) Ketersediaan Sumber Daya: Sumber daya yang memadai, termasuk dana, tenaga kerja, dan infrastruktur, sangat penting untuk pelaksanaan program yang efektif.
- 2) Kapasitas dan Kompetensi: Kemampuan dan kompetensi dari tim pelaksana program serta masyarakat lokal mempengaruhi efektivitas program. Pelatihan dan pengembangan kapasitas sering kali diperlukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Lokus penelitian berada di Kecamatan Barombong dengan melakukan evaluasi program yang sama di setiap desa dengan tujuan utama desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim bencana di daerah tersebut, adapun untuk waktu penelitian akan dilaksanakan 2 bulan penelitian.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif, dengan pengumpulan data menggunakan dua metode yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan utama pada penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan metode kuantitatif digunakan sebagai metode pendukung dengan tujuan untuk melengkapi data kualitatif.

Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berencana untuk memahami kemampuan-kemampuan yang bisa didapatkan dari subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap rumusan masalah pertama dan kedua dengan tujuan penelitian yaitu Untuk Mengetahui penerapan dan hasil evaluasi menggunakan model evaluasi CIPP Pada Program Desa Tanggap Pengendalian dan perubahan Iklim di Kabupaten Gowa dengan berfokus pada *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*, Kemudian pendekatan kuantitatif

digunakan untuk mengungkap rumusan masalah ketiga dengan tujuan Untuk mengetahui efektifitas hasil evaluasi Program Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan Iklim di Kabupaten Gowa dengan merujuk pada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu program yaitu Kualitas aparatur, Kompetensi administrator, Pengawasan.

C. Sumber Data (Populasi dan sampel)

Data Kualitatif

Untuk Mengetahui penerapan dan hasil evaluasi menggunakan model evaluasi CIPP Pada Program Desa Tanggap Pengendalian dan perubahan Iklim di Kabupaten Gowa, dalam penentuan informan ditetapkan secara *purposive*, untuk diwawancarai sehingga memperoleh data-data kualitatif. Informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan pada informan dianggap berkompeten dan terlibat dalam pelaksanaan program Desa Tanggap Pegendalian dan Perubahan iklim di daerah tersebut.

- 1) Unsur pemerintah
 - a) Camat Barombong/ Sekretaris Camat Barombong
 - b) Kepala Desa/ Sekretaris Desa
- 2) Tenaga Pendamping
 - a) Koordinator Pendamping Desa Kecamatan
 - b) Pendamping Lokal Desa

Adapun jumlah informan untuk pengumpulan data kualitatif tidak ditetapkan secara kaku karena pada pelaksanaannya di lapangan akan menyesuaikan kondisi, karena tujuan wawancara yang dilakukan adalah untuk mendapatkan data-data yang bersifat kualitatif, sehingga wawancara dapat dianggap cukup apabila telah didapatkan data dari informan yang mampu menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan.

Data Kuantitatif

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan kumpulan individu, objek, atau elemen yang memiliki karakteristik yang sama dan menarik minat peneliti. Populasi dalam penelitian ini keseluruhan masyarakat Kecamatan Barombong sebanyak 29.384 Jiwa yang terdiri dari 5 Desa Yaitu, Desa Tinggimae 4978, Desa Kanjilo 9305, Desa Moncobalang 5027, Desa Tamanynyeleng 6935, dan Desa Biringala 3139 Jiwa.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah individu atau elemen dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, dalam menentukan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dari peneliti. Untuk menentukan sampel, peneliti menggunakan teknik sampling berupa *Purposive Sampling*. Teknik

ini dilakukan berdasarkan pada pertimbangan dan karakteristik tertentu dimana desain pengambilan sampel menggunakan teknik ini berdasarkan pada penilaian peneliti tentang sampel mana yang tepat untuk memberikan informasi yang akurat.

Penentuan sampel menggunakan metode slovin. Hal ini digunakan karena acuan penentuan sampel berdasarkan jumlah populasi. Rumus slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir (tingkat toleransi).

Tingkat toleransi dalam rumus slovin yaitu:

Nilai e = 0,1 (10%)

Maka sampel yang ditentukan dalam penelitian ini berjumlah:

$$n = \frac{29.384}{1 + 29.384 \cdot (0.1)^2}$$

$$n = \frac{29.384}{1 + 293,84}$$

$$n = \frac{29.384}{294,84}$$

$$n = 99,660 \sim 100$$

Jadi, sampel untuk penelitian ini berjumlah 100 Jiwa dengan tingkat kepercayaan 90% dan kesalahan 10%. Semakin besar nilai toleransi maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi begitupun sebaliknya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berikut dapat diketahui bahwa teknik pengumpulan data yang dilaksanakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yaitu:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi subjektif dengan mengamati secara langsung fakta-fakta dari objek penelitian. Dimana objeknya dapat diketahui yaitu Kecamatan Barombong yang artinya peneliti akan datang langsung dan melihat keadaan sekitarnya, melihat masalah yang terjadi, dan kemudian disusun menjadi informasi observasional untuk penelitian ini.

2. Wawancara

Mengumpulkan informasi-informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada para informan, tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi penelitian sesuai dengan kebutuhan,

informan terdiri dari tokoh yang dianggap bisa memberikan data terkait dengan judul penelitian ini.

Informan atau Orang-orang yang dipilih yaitu Pemerintah Kecamatan Barombong, Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Barombong, Pendamping Lokal Desa, dan pemerintah Desa/Sekretaris Desa, adapun dilapangan peneliti menemukan orang-orang yang dianggap berkompeten yang bisa memberikan informasi maka peneliti akan menambah narasumber demi tercapainya tujuan penelitian.

3. Studi Dokumen

Cara ini dilakukan peneliti dengan mengaudit catatan-catatan yang memiliki hubungan dengan subjek penelitian. Laporan ini dapat berupa notulen rapat, file dokumentasi, catatan persuratan, catatan harian, artikel, dan lain-lain yang terkait dengan judul penelitian. Studi dokumen ini akan dikumpulkan dari 5 Desa yang ada di Kec.Barombong.

4. Kuesioner/Angket

Dalam kuesioner terdapat daftar pertanyaan secara terstruktur yang digunakan untuk diisi dan pengisiannya didampingi oleh pewawancara. Kuesioner digunakan untuk mendapatkan data-data mengenai tingkat efektifitas dari program Desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim yang ada di Kab.Gowa. Kuesioner akan diberikan kepada responden-responden yang

terlibat dalam penerapan program Desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim yang ada di daerah tersebut.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini diketahui sebagai berikut:

1. Penerapan evaluasi model CIPP pada program Desa Tanggap Pengendalian dan perubahan iklim, Evaluasi dilaksanakan untuk menilai tujuan dan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar disusunnya program-program atau evaluasi *Context*, mengidentifikasi dari masalah-masalah sumber daya dan peluang yang bisa membantu pengambil keputusan untuk mendefinisikan tujuan, prioritas, dan membantu kelompok-kelompok lebih luas untuk menilai tujuan, prioritas, dan manfaat atau masuk dalam tahapan evaluasi *input*. kemudian setiap program memiliki struktur perencanaan yang berbeda-beda dan tentunya proses yang dilaksanakan harus sesuai aturan atau rencana kerja yang berlaku atau evaluasi *process* dan terakhir mengidentifikasi program yang diupayakan dapat mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka Panjang atau evaluasi *Product*. Kemudian diamati berdasarkan tabel 3.1
2. Efektifitas pelaksanaan program Desa Tanggap Pengendalian dan perubahan iklim, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas program Desa tanggap pengendalian dan perubahan

iklim yaitu, Tujuan dan Indikator yang jelas, Keterlibatan *Stakeholder*, dan Sumber Daya dan Kapasitas yang dapat diteliti berdasarkan tabel 3.2

Tabel 3.1 Aspek dan indikator Penerapan dan Hasil evaluasi model CIPP pada program Desa Tanggap Pengendalian dan perubahan iklim dalam penelitian Kualitatif

Aspek/Variabel	Indikator/Komponen	Sumber	Instrumen
Evaluasi <i>Context</i> Evaluasi dilaksanakan untuk menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dan diidentifikasi disusunnya program-program.	1) Tujuan Program 2) Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat 3) Dukungan kebijakan 4) Konteks lingkungan	Pemerintah Masyarakat	Observasi Wawancara Kuesioner/Angket
Evaluasi <i>input</i> Mengidentifikasi dari masalah-masalah sumber daya dan peluang yang bisa membantu pengambil keputusan untuk	1) Sumber Daya Manusia (Materi Pelatihan, jenis Kegiatan) 2) Sumber Daya Finansial /Anggaran 3) Sarana Dan Prasarana	Pemerintah Masyarakat	Observasi Wawancara

<p>mendefinisikan tujuan, prioritas, dan membantu kelompok-kelompok lebih luas untuk menilai tujuan, prioritas, dan manfaat.</p>			
<p>Evaluasi <i>process</i></p> <p>Setiap program memiliki struktur perencanaan yang berbeda-beda dan tentunya proses yang dilaksanakan harus sesuai aturan atau rencana kerja yang berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan kegiatan 2) Manajemen program 3) Partisipasi masyarakat 	<p>Pemerintah Masyarakat</p>	<p>Observasi Wawancara</p>
<p>Evaluasi <i>Product</i>.</p> <p>Mengidentifikasi program yang diupayakan dapat mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan atau</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pencapaian Tujuan program, 2) Dampak jangka pendek 3) Dampak jangka panjang 	<p>Pemerintah Masyarakat</p>	<p>Observasi Wawancara</p>

tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka Panjang.			
---------------------------------------------------------------	--	--	--

Tab 3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Efektifitas dari pelaksanaan program Desa Tanggap Pengendalian dan perubahan iklim dalam penelitian kuantitatif

Variabel	Indikator/Komponen	Sumber	Instrumen	Skala pengukuran	Parameter
Tujuan dan Indikator yang Jelas	1) Tujuan yang Terdefinisi 2) Indikator Kinerja	Pemerintah Masyarakat	Wawancara Kuesioner	Skala ordinal	Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Tidak Efektif
Keterlibatan Stakeholder	1) Partisipasi Aktif 2) Komunikasi dan Koordinasi	Pemerintah Masyarakat	Wawancara Kuesioner	Skala Ordinal	Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Tidak Efektif
Sumber Daya dan Kapasitas	1) Ketersediaan Sumber Daya 2) Kapasitas dan	Pemerintah Masyarakat	Wawancara Kuesioner	Skala Ordinal	Sangat Efektif Efektif Cukup

	Kompetensi				Efektif Tidak Efektif
--	------------	--	--	--	-----------------------------

F. Metode analisis data

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis data yaitu, metode analisis deskriptif kualitatif dan metode analisis deskriptif kuantitatif.

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan penerapan dan hasil implementasi rekomendasi program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim yang ada di daerah lokasi penelitian. Teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman pada tahun 1992 adalah salah satu pendekatan yang populer dalam analisis data kualitatif. Model ini menekankan pada proses yang berulang dan interaktif dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Berikut adalah komponen utama dari model interaktif Miles dan Huberman:

- 1) **Pengumpulan Data:** Data dikumpulkan melalui berbagai metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini berkelanjutan dan tidak berhenti hanya pada satu tahap penelitian.

2) Reduksi Data: Data yang telah dikumpulkan kemudian diringkas, diseleksi, atau difokuskan pada bagian-bagian yang relevan. Proses ini membantu peneliti dalam mengorganisasikan dan menyederhanakan data yang besar dan kompleks.

3) Penyajian Data: Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk matriks, grafik, jaringan, atau diagram untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola, hubungan, atau tren yang ada. Penyajian data ini bersifat interaktif dan dinamis.

4) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Dari data yang telah disajikan, peneliti mulai menarik kesimpulan sementara. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi atau divalidasi melalui proses pengumpulan data lebih lanjut atau triangulasi dengan sumber data lain.

5) Interaktivitas: Keempat komponen di atas tidak terjadi secara linear tetapi saling berinteraksi dan berulang-ulang. Peneliti terus bergerak antara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sepanjang proses penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu derajat kepercayaan yaitu *triangulasi*. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sumber data dan waktu.

2. Analisis Kuantitatif

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menyajikan data berupa angka-angka sebagai hasil penelitiannya dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang merupakan suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, atau peristiwa saat ini. Tahap-tahap pengolahan dan analisis data kuantitatif hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kelengkapan jawaban, data yang diperoleh akan diperiksa kembali oleh peneliti untuk mencari jawaban dari kuesioner yang tidak lengkap.
2. Menghitung jumlah atau frekuensi dari masing-masing jawaban dalam kuesioner.
3. Menghitung persentase jawaban responden dalam bentuk tabel tunggal melalui distribusi frekuensi dan persentase.

Jawaban responden yang diperoleh melalui kuesioner terstruktur diberi skor atau bobot antara 1 sampai 4, dengan rincian:

- a) Jawaban sangat Efektif = 4
- b) Jawaban Efektif = 3
- c) Jawaban Cukup Efektif = 2
- d) Jawaban Tidak Efektif = 1

Perhitungan Skor Total, menghitung skor total untuk setiap responden atau unit analisis. Misalnya, ada 12 pertanyaan dengan

skala likert 1-4, maka skor total maksimal adalah 48 (12 pertanyaan x 4) dengan Rata-rata skor total = Jumlah Skor/ 4.

Menentukan kriteria untuk menilai efektivitas berdasarkan skor total, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Skor 0-25: Tidak efektif
- 2) Skor 26-50: Cukup efektif
- 3) Skor 51-75: Efektif
- 4) Skor 76-100 Sangat Efektif

Hasil perhitungan kuantitatif tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif menggunakan tabel yang kemudian akan menjadi bahan masukan bagi analisis-*analisis* secara kualitatif.

Analisis data dengan metode campuran (mix methods) menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis **Concurrent Embedded Design**. Metode ini mengintegrasikan satu jenis data ke dalam kerangka jenis data lainnya. Data kualitatif bisa digunakan untuk mendukung atau memperjelas data kuantitatif atau sebaliknya. Creswell & Plano Clark (2011) menyebutkan bahwa desain ini bermanfaat ketika peneliti memiliki pertanyaan penelitian utama yang lebih terfokus pada satu jenis data, tetapi memerlukan tipe data tambahan untuk

memberikan konteks atau wawasan lebih lanjut. Dalam penelitian ini analisis data dengan mix metode disesuaikan berdasarkan kebutuhan pemenuhan data setiap indikator.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Geografis dan Administrasi Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah Kabupaten/Kota yang terletak di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto sedangkan di bagian Baratnya berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Gowa



Sumber: humas.gowakab

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas daerah sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km.

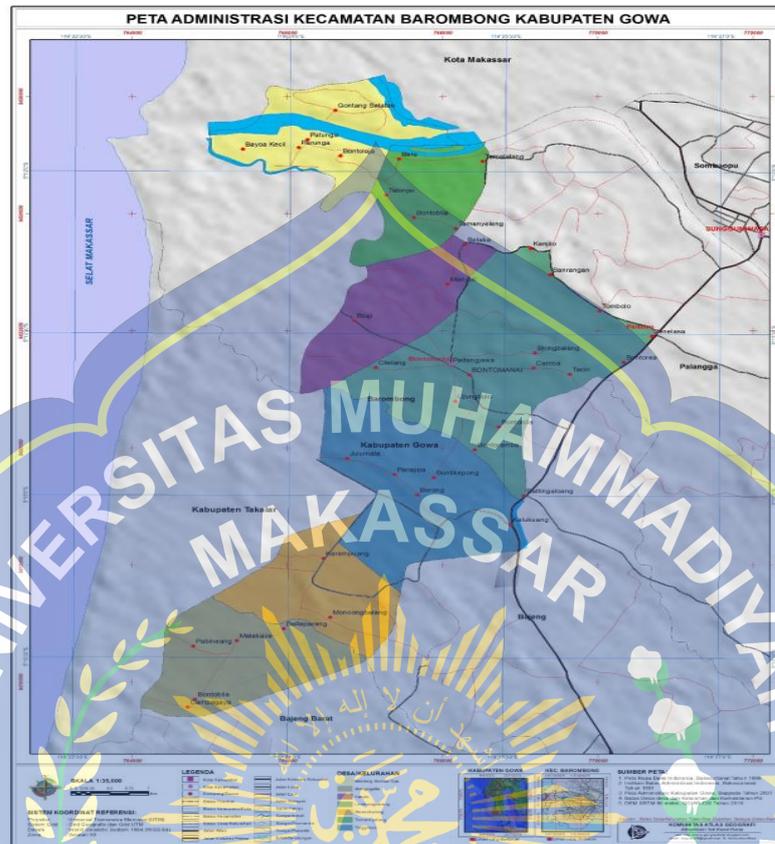
Kabupaten Gowa mempunyai keadaan geologis, geografis, demografis, serta hidrologis yang mungkin saja dapat menimbulkan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Kondisi ini dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan sehingga diperlukan usaha sebagai upaya menanggulangi bencana secara terpadu, terencana, dan terkoordinasi. Potensi bencana terjadi di 8 kecamatan yang melanda beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Gowa pada tahun 2022 yaitu bencana longsor, banjir, dan angin

kencang. Kejadian bencana di Kabupaten Gowa berdampak pada pemukiman warga dengan sejumlah rumah.

Kecamatan Barombong terbentuk pada tahun 2006, setelah dimekarkan dari Kecamatan Pallangga. Ibu kota Kecamatan Barombong berada di Kanjilo dengan jarak sekitar 6,50 km dari ibu kota kabupaten di Sungguminasa. Kecamatan Barombong merupakan daerah dataran yang berbatasan Sebelah Utara Kecamatan Pallangga, Kabupaten Takalar dan Kota Makassar Sebelah Selatan Kecamatan Bajeng dan Kota Makassar Sebelah Barat Kabupaten Takalar dan Kota Makassar sedangkan di Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bajeng. Kecamatan Barombong berada pada ketinggian dari permukaan laut berkisar rata-rata 25 meter. Dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 7 desa/kelurahan dan dibentuk berdasarkan PERDA No. 7 Tahun 2005, yang terdiri dari : Biringala, Moncobalang, Tinggimae, Lembangparang, Kanjilo, Tamanyeleng dan Benteng Somba Opu.

Adapun jumlah penduduk yang ada di kecamatan barombong yaitu 29.384 Jiwa yang terbagi pada 5 Desa, Desa Tinggimae 4978, Desa Kanjilo 9305, Desa Moncobalang 5027, Desa Tamanyeleng 6935, dan Desa Biringala 3139 Jiwa. Jumlah penduduk tersebut diuar dari penduduk yang ada pada 2 kelurahan yaitu kelurahan lembang parang dan kelurahan somba opu.

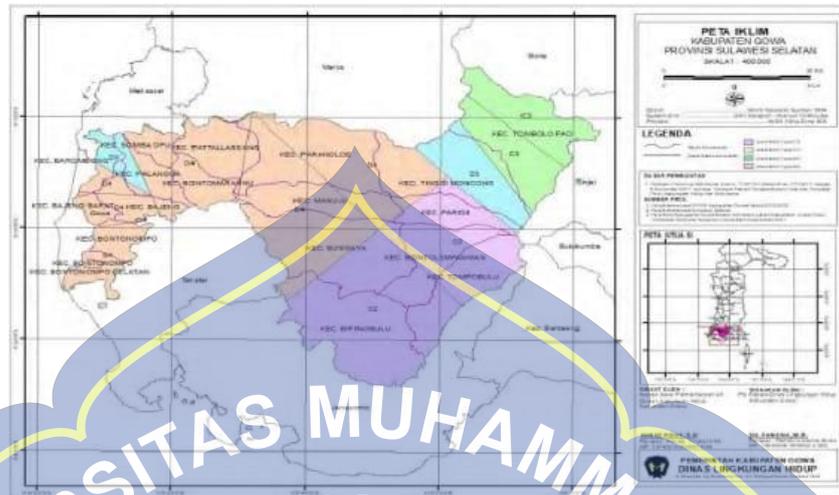
Gambar 4.2 Peta Administrasi Kec.Barombong



Sumber: humas.gowakab

Kecamatan barombong masuk kedalam 10 kecamatan yang berpotensi terjadi bencana di Kab.Gowa dari 18 kecamatan di daerah berjuluk butta bersejarah ini, ada 10 kecamatan yang daerahnya berpotensi mengalami bencana alam tinggi. 10 kecamatan ini yakni yang masuk jenis potensi bencana banjir. Ada di dataran tinggi dan dataran rendah diantaranya, Somba Opu, Pallangga, Bajeng, Bontolempangan, Bontonompo, Parangloe, Barombong, Bontonompo Selatan dan Pattalasang.

Gambar 4.3 Peta Iklim Kabupaten Gowa



Sumber: [humas.gowakab](http://humas.gowakab.go.id)

Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait perubahan iklim di Kabupaten Gowa merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. RAD ini biasanya disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Berikut adalah tabel yang merangkum Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Gowa terkait perubahan iklim:

Tabel 4.1 Rencana Aksi Daerah Kabupaten Gowa

No	Komponen	Tindakan	Deskripsi	Target Tahun	Indikator Kinerja
1	Penilaian Risiko dan Kerentanan	Penilaian Kerentanan Iklim	Mengidentifikasi area dan sektor yang rentan terhadap perubahan iklim	2024	Laporan penilaian risiko dan kerentanan selesai
2	Strategi Mitigasi	Penggunaan Energi Terbarukan	Implementasi proyek energi terbarukan seperti solar dan hidro	2025	Proyek energi terbarukan diimplementasikan
		Peningkatan Efisiensi Energi	Program untuk meningkatkan efisiensi energi di sektor industri, transportasi, dan bangunan	2025	Penurunan konsumsi energi per sektor (%)
		Pengelolaan Limbah yang Lebih Baik	Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah untuk mengurangi emisi metana	2026	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah dibangun
		Program Reboisasi dan Penghijauan	Penanaman pohon di area hutan gundul dan daerah aliran Sungai	2024-2026	Area hutan yang direboisasi (ha)
3	Strategi Adaptasi	Pembangunan Infrastruktur Tahan Bencana	Pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap banjir dan bencana lainnya	2024-2028	Jumlah infrastruktur tahan bencana dibangun
		Pengelolaan Sumber Daya Air yang Lebih Baik	Pembangunan bendungan dan waduk untuk mengelola sumber daya air	2025-2027	Jumlah bendungan dan waduk yang dibangun
		Pelatihan Pertanian Berkelanjutan	Pelatihan kepada petani tentang praktik	2024-2026	Jumlah petani yang dilatih

			pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim		
4	Pendidikan dan Kesadaran Publik	Kampanye Kesadaran Publik	Kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim dan langkah mitigasi	2024-2025	Jumlah kampanye publik yang dilakukan
		Program Pendidikan di Sekolah	Integrasi pendidikan perubahan iklim ke dalam kurikulum sekolah	2024-2025	Jumlah sekolah yang mengadopsi program
5	Kerjasama dan Kolaborasi	Kerjasama dengan Lembaga Nasional dan Internasional	Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk implementasi RAD	2024-2026	Jumlah MOU yang ditandatangani
6	Monitoring dan Evaluasi	Penetapan Indikator Kinerja dan Monitoring Berkala	Menetapkan indikator kinerja dan melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan RAD	2024-2028	Laporan monitoring dan evaluasi berkala

Sumber: [humas.gowakab](http://humas.gowakab.go.id)

Tabel ini memberikan gambaran umum tentang berbagai tindakan yang diambil oleh Kabupaten Gowa dalam menghadapi perubahan iklim, beserta target tahun dan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilannya. Tindakan pemerintah didasarkan atas bencana yang sering terjadi di wilayah

tersebut berikut Data bencana di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, untuk tahun 2023 berdasarkan data dari BNPB:

Tabel 4.2 Data kejadian bencana tahun 2023 Kec Barombong

Jenis Bencana Tahun 2023	Dampak Bencana	Pengungsi
Banjir: 5 Kejadian Angin Putting Beliung: 3 Kejadian	Korban Jiwa: Tidak ada laporan korban jiwa Kerusakan Infrastruktur: 50 rumah rusak dan beberapa fasilitas umum terdampak	Sekitar 200 orang mengungsi akibat bencana yang terjadi.

Sumber: BNPB

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) nomor 13 adalah "Tindakan terhadap Perubahan Iklim" yang berfokus pada pengendalian dan mitigasi perubahan iklim. Di tingkat desa, pencapaian terkait SDGs 13 dapat dilihat dari berbagai inisiatif dan program yang diimplementasikan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat. Berdasarkan hasil inputan pada sistem informasi desa atau SID hasil/capaian SDGS ke 13 berdasarkan penerapan beberapa program dapat dilihat

sebagai berikut:

Tabel 4.3 Capaian SDGs ke 13 Kecamatan Barombong

NO	Sasaran	Desa	Skor / Capaian SDGs %
1	Penanganan/mitigasi bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT	Kanjilo	10,00
2		Moncobalang	35,48
3		Tinggimae	62,50
4		Biringala	10,00
5		Tamanynyeleng	10,34

Sumber: SID.kemendes

Capaian SDGs ke 13 atau Desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim dari 5 desa yang ada di Kecamatan Barombong ini masih menunjukkan angka kurang, capaian tertinggi yaitu Desa Tinggimae dengan 62,50% dan keempat desa lainnya masih jauh tertinggal oleh karena itu tujuan dari evaluasi ini untuk mengetahui Dimana letak kekurangan pelaksanaan program yang bisa diperbaiki untu menunjang hasil pencapaian tujuan yang lebih baik. Setiap desa tentunya memiliki cara atau permasalahan yang berbeda-beda dalam implementasi program ini.

B. HASIL PENELITIAN

a. Evaluasi model CIPP Pada Program Desa Tanggap Pengendalian dan perubahan Iklim

1) Evaluasi *Context*

Tujuan Program

Tujuan dari program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim adalah untuk menciptakan masyarakat desa

yang lebih tangguh dan berdaya dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Beberapa tujuan utama dari program ini meliputi:

Tabel 4.4 Tujuan SDGS 13

SDGs 13	Tujuan
Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan Iklim	Indeks Ratio Bencana (IRT) mencapai 0 di seluruh RT
	Penanganan/mitigasi resiko bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT

Tujuan desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim sangat penting karena beberapa alasan yaitu, Mitigasi Dampak Perubahan Iklim Dimana Desa yang ada di Kecamatan Barombong harus tanggap terhadap perubahan iklim dapat mengurangi dampak negatif seperti banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya. Kemudian Adaptasi dan Ketahanan yaitu siap menghadapi perubahan iklim akan lebih mampu beradaptasi dengan kondisi cuaca yang berubah. Ini termasuk penggunaan teknologi pertanian yang tahan terhadap cuaca ekstrem, manajemen sumber daya air yang efisien, dan infrastruktur yang Tangguh, Serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan. Pendekatan tanggap iklim mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti hutan, lahan pertanian, dan air. Ini penting untuk menjaga

keseimbangan ekosistem dan mendukung mata pencaharian masyarakat desa. Dengan demikian, tujuan desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim adalah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta memastikan keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Evaluasi *Context* pada penanganan Perubahan iklim adalah langkah awal dalam model evaluasi CIPP yang bertujuan untuk memahami tujuan program, Kesesuaian dengan kebutuhan Masyarakat, Dukungan kebijakan dan Konteks lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan program penanganan perubahan iklim/ bencana. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi pemahaman terkait tujuan program, Peneliti melakukan wawancara dengan Koordinator pendampig desa Kecamatan Barombong yang mengatakan bahwa:

“Tujuan program Desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim yaitu agar pemerintah Desa mampu mempersiapkan desa nya dalam menghadapi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Tujuan dari program ini sudah disosialisasikan kepada Masyarakat setempat.” (Hasil wawancara dengan Koordinator Pendampig Desa Kecamatan Barombong, 28 Mei 2024).

Hasil yang diharapkan kepada masyarakat agar lebih sadar dan memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengambil tindakan mitigasi dan adaptasi serta Meningkatkan pemahaman

masyarakat desa mengenai perubahan iklim dan dampaknya. Pada kesempatan lain Peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Moncobalang yang mengatakan bahwa:

“Program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim sangat bagus karena bisa membantu penanggulangan dan pengendalian apalagi mitigasi terhadap perubahan iklim di Desa yang sering dialami yang terkadang berubah-ubah, tujuan dari program ini yaitu untuk membantu Masyarakat dalam mengantisipasi terkait perubahan iklim yang terjadi di wilayah kita khususnya untuk desa moncobalang” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Moncobalang, 28 Mei 2024).

Implementasi Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan Iklim diharapkan dapat menciptakan masyarakat desa yang lebih tanggap, resilient, dan mandiri dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Melalui langkah-langkah yang sistematis dan partisipatif, tujuan tersebut dapat tercapai dengan dukungan dan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait. Tujuan program ini juga dijelaskan sebagai jalan untuk menuju target capaian indeks ratio bencana mencapai 0 diseluruh RT, Peneliti melakukan wawancara dengan Pendamping Lokal Desa yang mengatakan bahwa:

“Tujuan utama yang ingin dicapai dalam implementasi beberapa rekomendasi program untuk lima desa di kecamatan barombong yaitu IRT mencapai 0 diseluruh RT dan penanganan/mitigasi bencana bisa mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan pada tiap RT yang ada di

Kecamatan Barombong ini” (Hasil wawancara dengan Pendamping Lokal Desa, 29 Mei 2024).

Dalam mengidentifikasi tujuan para pelaksana program sudah paham kemana sebenarnya arah dan tujuan dari program tersebut dimana secara umum program ini bertujuan untuk membantu menangani dan mempersiapkan diri/desa jika sewaktu-waktu terjadi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim yang tidak dapat dihindarkan olehnya itu pemerintah perlu mengantisipasi dengan menerapkan program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim.

Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat

Dalam pelaksanaan program ini pengambilan Keputusan penanganan kebencanaan perlu menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah/masyarakat setempat. Berikut hasil survey/kuesioner pada 5 pernyataan dengan 100 sampel Masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Barombong dengan nilai rata-rata dari setiap responden sebagai berikut:

Berdasarkan hasil survey jumlah skor secara keseluruhan yaitu 260/4 (65) Tingkat kesesuaian pelaksanaan program baik dari segi implementasi, sumber daya maupun sarana dan prasarana yang ada, angka ini tentu masih cukup jauh dari angka sempurna menurut Masyarakat setempat dan tentunya

perlu adanya perbaikan dan pembaharuan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Pemerintah Desa membutuhkan kehadiran pemerintah kabupaten terutama pada BPBD atau dinas lingkungan hidup kebutuhan ini sudah seharusnya tertuang pada MOU Kerjasama dalam menangani situasi dan kondisi perubahan iklim yang berlebihan akan tetapi Kerjasama ini belum tertuang secara resmi, peneliti melakukan wawancara dengan kepala Sekretaris Desa Kanjilo yang mengatakan bahwa:

“Kami selaku pemerintah di desa membutuhkan dukungan dan bantuan dari pihak-pihak lain yang ahli di bidangnya contohnya BPBD atau dinas lingkungan hidup akan tetapi jangkauan kami belum sampai kesana dan biasanya jika terjadi sesuatu akan menghubungi lewat telepon saja untuk meminta arahan” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Kanjilo, 29 Mei 2024).

Kebutuhan Kerjasama sangat mempengaruhi pelaksanaan program yang ada di Desa, program harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, LSM, dan sektor swasta. Kerjasama dengan pihak luar dapat menyediakan sumber daya tambahan dan pengetahuan teknis yang dibutuhkan oleh desa. Partisipasi dalam jaringan desa tanggap perubahan iklim dapat memperkaya program dengan praktik terbaik dari daerah lain. Peneliti melakukan wawancara Kepala Desa Tinggimae yang mengatakan bahwa:

“MOU ini sebenarnya yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah desa kita perlu gagasan untuk menghadirkan Kerjasama yang baik kepada pemerintah kabupaten yang selama ini mungkin belum terjadi walaupun sebenarnya jika dibutuhkan dan dihubungi pasti ada bantuan dari mereka tetapi perlu yang namanya kepastian atau legalitas Kerjasama yang harus terjalin dan ini yang belum dilaksanakan oleh pemerintah setempat ” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tinggimae, 29 Mei 2024).

Sumber daya manusia yang berkualitas perlu dimiliki oleh pemerintah Desa yang menjadi kebutuhan untuk pelaksanaan program. Program harus memberdayakan dan melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap, dari perencanaan hingga evaluasi, untuk memastikan bahwa program benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelatihan dan pendidikan yang ditawarkan harus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan mengelola sumber daya alam. Peneliti melakukan wawancara dengan Pendamping Lokal Desa yang mengatakan bahwa:

“Selain Kerjasama yang baik kami juga membutuhkan support peningkatan SDM yang mungkin bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan SDM di Desa yang menjadi peserta, hal ini bisa mempermudah peran pemerintah Desa dalam membina SDM yang ada” (Hasil wawancara dengan Pendamping Lokal Desa, 29 Mei 2024).

Pemerintah harus memberikan perhatian pada alur Kerjasama yang baik dengan pemerintah yang lebih diatas, karena bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa

untuk memastikan setiap keadaan yang diakibatkan oleh perubahan iklim bisa dikendalikan dengan baik dan nyata bentuk penanganan yang diberikan agar Masyarakat bisa merasakan kehadiran pelayanan dan perhatian dari pemerintah.

Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan di tingkat desa terkait penanggulangan bencana sangat penting untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah jenis dukungan kebijakan yang seharusnya diterapkan di tingkat desa untuk penanggulangan bencana:

1. Kebijakan Desa dan Peraturan Lokal

Pembentukan peraturan desa yang mengatur tata cara penanggulangan bencana, termasuk mekanisme evakuasi, pembentukan tim tanggap bencana, dan pengelolaan logistik darurat.

2. Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan

Pelatihan Tanggap Darurat

Menyelenggarakan pelatihan bagi aparat desa, relawan, dan masyarakat mengenai teknik penanggulangan bencana, pertolongan pertama, dan penggunaan peralatan darurat.

Mengadakan simulasi bencana untuk melatih kesiapsiagaan dan koordinasi tim tanggap darurat.

Edukasi Masyarakat

Program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan langkah-langkah pencegahan yang harus diambil.

3. Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas

Pembangunan atau perbaikan infrastruktur yang mendukung penanggulangan bencana, seperti posko bencana, tempat evakuasi, dan saluran drainase untuk mencegah banjir.

4. Koordinasi dan Kerjasama

Membentuk tim tanggap bencana di tingkat desa yang terdiri dari aparat desa, relawan, dan masyarakat yang terlatih dalam penanggulangan bencana. Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan lembaga terkait untuk dukungan teknis dan sumber daya.

5. Kerjasama Antar Desa

Mendorong kerjasama antar desa untuk berbagi sumber daya, informasi, dan pengalaman dalam penanggulangan bencana.

Pembentukan jaringan desa tanggap bencana untuk koordinasi lintas desa.

6. Pendanaan dan Sumber Daya

Alokasi anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk kegiatan penanggulangan bencana, termasuk pelatihan, pembangunan infrastruktur, dan pembelian peralatan. Pengajuan proposal untuk mendapatkan dana dari lembaga donor, lembaga internasional, atau organisasi non-pemerintah yang mendukung penanggulangan bencana.

Analisis dukungan kebijakan yang mengatur atau menunjang pelaksanaan program ini yang ada di Kecamatan Barombong, peneliti melakukan wawancara dengan Koordinator Pendamping Desa Kecamatan yang mengatakan bahwa:

“Merujuk pada peraturan Menteri baik itu Menteri keuangan ataupun Menteri Desa terkait penggunaan dana desa untuk kegiatan tersebut karena itu yang akan menjadi rujukan pemerintah desa dalam menganggarkan kegiatan-kegiatan penanganan, peraturan Menteri keuangan Nomor 145 dan 146 tahun 2023” (Hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Barombong, 28 Mei 2024).

Selain itu terdapat kebijakan lain yang mengatur penggunaan dana desa untuk anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program, peneliti melakukan wawancara dengan Pendamping Lokal Desa yang mengatakan bahwa:

“Peraturan Menteri desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang legalitas penggunaan dana desa bagi pemerintah desa yang adadiseluruh Indonesia terutama di Kecamatan Barombong” (Hasil wawancara dengan Pendamping Lokal Desa, 29 Mei 2024).

Dalam mengatur pelaksanaan program Kepala Desa mengeluarkan Keputusan untuk mengatur jalannya pelaksanaan program, Dengan sinergi antara kebijakan yang ada dan kebutuhan spesifik desa, program ini bisa berhasil meningkatkan ketahanan desa terhadap perubahan iklim dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Memanfaatkan Dana Desa untuk inisiatif yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Peneliti melakukan wawancara dengan Pendamping Lokal Desa yang mengatakan bahwa:

“Setiap desa mengeuarkan Keputusan untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengatur apa yang sudah disediakan seperti Keputusan pengangkatan timsatgas bencana, Keputusan Pelatihan serta Keputusan penggunaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang benar dan aturan lainnya” (Hasil wawancara dengan Pendamping Lokal Desa, 29 Mei 2024).

Kebijakan yang ada di desa saat ini yaitu kebijakan pelatihan dan SK Relawan, diluar dari itu setiap kebijakan perlu dipatuhi demi kebaikan Bersama agar setiap desa tidak keliru dalam mengambil Keputusan baik itu dalam penggunaan dana desa ataupun Keputusan-keputusan menyangkut pelaksanaan program. Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang masih kurang dalam menunjang keberhasilan program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim atau peanggulangan bencana yang ada di Kecamatan Barombong.

Konteks Lingkungan

Karakteristik lingkungan yang bervariasi tergantung pada kondisi geografis dan sosial di desa tersebut. Desa yang berada di dataran rendah seperti pada Kecamatan Barombong Biasanya menghadapi masalah banjir maupun kekeringan. Program adaptasi mungkin melibatkan pembuatan tanggul dan drainase yang lebih baik. Mengenali area yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, atau kekeringan membantu dalam merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk mengurangi risiko dan dampak bencana tersebut. Pemahaman yang baik tentang karakteristik lingkungan membantu dalam melibatkan masyarakat secara aktif dalam program ini sekaligus menunjukkan bahwa setiap desa memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda dalam menghadapi perubahan iklim dan pengendalian bencana.

Tabel 4.5 Jenis bencana yang terjadi tahun 2023

NO	Nama Desa	Bencana Yang Pernah Terjadi
1	Kanjilo	Banjir
2	Moncobalang	Kebakaran Angin Kencang
3	Tinggimae	Kebakaran Banjir
4	Biringala	Kebakaran Angin kencang
5	Tamanynyeleng	Banjir

Setiap desa menghadapi konteks lingkungan yang kemungkinan terjadi bencana yang berbeda-beda pada setiap desa dimana dikatakan dalam wawancara peneliti dengan sekretaris Desa Kanjilo yaitu:

“Desa Kanjilo bisa dikatakan desa langganan banjir diantara desa-desa yang ada di Kecamatan Barombong, mungkin tahun 2024 ini tidak terjadi banjir akan tetapi pada tahun-tahun sebelumnya sering terjadi banjir terutama pada Dusun Kanjilo, Tanggalla dan Bilaji karena adanya luapan Sungai sehingga menggenangi pemukiman warga. Bahkan pernah terjadi proses evakuasi banjir sampai penuh tempat evakuasi” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Kanjilo, 29 Mei 2024).

Jenis bencana yang memungkinkan akan terjadi saat cuaca panas yaitu kebakaran dan angin kencang yang pernah terjadi di Desa Biringala. Pola cuaca lokal, seperti musim hujan yang tidak menentu atau periode kekeringan yang panjang, sangat mempengaruhi pertanian dan ketersediaan air. Inisiatif pengelolaan air dan praktik pertanian tahan iklim perlu diterapkan untuk menghadapi variabilitas cuaca. Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Biringala yang mengatakan bahwa:

“Desa Biringala berfokus pada penanganan atau pencegahan terjadinya kebakaran ada beberapa kejadian kebakaran rumah warga dan oleh karena itu kami berfokus pada pengadaan alat pemadam kebakaran mini dan cara penggunaannya yang didanai langsung oleh dana desa sebagai bentuk antisipasi kami sebagai pemerintah” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Biringala, 28 Mei 2024).

Konteks lingkungan desa sangat mempengaruhi desain dan implementasi program Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan Iklim. Menyesuaikan strategi adaptasi dan mitigasi dengan risiko spesifik seperti banjir, atau kekeringan. Memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara berkelanjutan dan praktik pertanian ramah lingkungan diterapkan. Fokus penanganan jenis bencana yang ada di Desa Moncobalang hampir sama dengan yang ada di Desa Biringala, peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris Desa Moncobalang yang mengatakan bahwa:

“Desa Moncobalang” berfokus pada penanganan atau pencegahan terjadinya kebakaran makanya kami sudah buat yang namanya balakar, balakar itu sendiri adalah relawan pemadam kebakaran dan pernah ikut berpartisipasi dalam apel akbar di Kantor Bupati Gowa yang di SK kan sejak tahun 2018” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Moncobalang, 28 Mei 2024).

Desa di daerah dataran tinggi mungkin rentan terhadap longsor, sementara desa di dataran rendah mungkin menghadapi risiko banjir. Program adaptasi perlu menyesuaikan dengan risiko spesifik, misalnya, memperkuat infrastruktur di daerah banjir atau membangun sistem peringatan dini untuk longsor. Kondisi lingkungan yang di kecamatan Barombong dijelaskan oleh Sekretaris kecamatan yang mengatakan bahwa:

“Kondisi lingkungan perlu diperhatikan karena kita tidak bisa memprediksi apakah dalam 1 tahun terakhir kita akan

mendapatkan bencana apa, apakah itu banjir, angin puting beliung atau kebakaran oleh karena kondisi lingkungan yang tidak menentu maka mitigasi bencana ini sangat diperlukan terutama ditekankan pada pemerintah desa, ada 5 desa di kecamatan barombong ini semua harus mengantisipasi yang namanya bencana karena adanya perubahan iklim” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Barombong, 30 Mei 2024).

Pemerintah sudah mengenali karakteristik lingkungan di wilayahnya masing-masing oleh karenanya program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim ini dilaksanakan sesuai kebutuhan lingkungan di desa masing-masing. Walaupun kadang tidak bisa terlepas dari jenis-jenis bencana yang lain akibat adanya perubahan iklim yang semakin tidak menentu.

Dapat disimpulkan bahwa dalam evaluasi *Context* pada program Desa tanggap pengendalian perubahan iklim yang ada di kecamatan barombong dengan tujuannya untuk memahami tujuan dari pelaksanaan program yang yaitu untuk membantu menangani dan mempersiapkan jika sewaktu-waktu terjadi bencana di Desa masing-masing yang disebabkan oleh perubahan iklim yang tidak dapat terhindarkan, kondisi lingkungan yang tidak menentu dapat mempengaruhi pelaksanaan program penanganan perubahan iklim di

Kecamatan Barombong. Program yang dilaksanakan berupa sosialisasi kepada Masyarakat terkait penanganan bencana yang berbeda-beda di setiap desa ada yang berfokus pada penanganan banjir karena daerahnya yang rawan terjadi banjir

serta adapula yang berfokus pada kejadian-kejadian seperti kebakaran pemerintah setempat harus memahami karakteristik lingkungan yang ada serta menerapkan program sesuai dengan jenis bencana yang sering terjadi agar bisa mencapai target terhadap Desa Tanggap pengendalian dan perubahan iklim, yaitu Indeks ratio bencana (IRT) mencapai 0 diseluruh RT, dan penanganan/mitigasi resiko bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT.

2) Evaluasi *Input*

Sumber Daya Finansial

Evaluasi *input* adalah bagian penting dari proses evaluasi program. Dalam evaluasi input, fokusnya adalah pada sumber daya manusia dan finansial/pendanaan dan kondisi sarana dan prasarana program yang mempengaruhi pelaksanaan dan hasil dari program tersebut sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang kesiapan dan kelayakan program sebelum tahap pelaksanaan. Evaluasi input membantu mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan memungkinkan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan agar program dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Berikut adalah jenis pelatihan dan anggaran yang digunakan oleh pemerintah desa di Kecamatan Barombong.

Tabel 4.6 Dana Desa Terkait Penanggulangan Bencana

NO	Nama Desa	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
1	Kanjilo	Penanggulangan Bencana	RP. 24.200.000	RP. 8.325.000
2	Moncobalang	Penanggulangan Bencana	RP. 10.650.000	RP. 10.650.000
3	Tinggimae	Penanggulangan Bencana	RP. 41.051.005	RP. 40.051.005
4	Biringala	Penanggulangan Bencana	RP. 10.500.000	RP. 10.500.000
5	Tamanynyele ng	Penanggulangan Bencana	RP. 22.856.000	RP. 22.856.000

Setiap desa memiliki anggaran untuk pelaksanaan program yang berbeda-beda tergantung banyaknya Dana Desa yang diterima, Desa Tinggimae memiliki dana penanggulangan bencana yang paling tinggi di antara keempat desa lainnya yaitu RP.41.051.005 dan Desa Biringala dengan anggaran yang lebih rendah yaitu RP.10.500.000.

Pelaksanaan program Desa Tanggap pengendalian dan perubahan iklim di kecamatan barombong pemerintah setempat perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memberikan pelatihan-pelatihan terkait penanganan bencana. Peneliti melakukan wawancara dengan koordinator pendamping desa Kecamatan yang mengatakan bahwa:

“Persiapan kelima desa dalam penanganan bencana yaitu membentuk tim satgas penanganan bencana yang kemudian di SK kan oleh kepala desa yang terdiri dari

unsur tokoh pemuda pemudi kemudian tim satgas ini diberikan pelatihan dengan materi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan oleh setiap Desa ” (Hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Barombong, 28 Mei 2024).

Sumber finansial yang dibutuhkan oleh pemerintah setempat didapatkan dari Dana Desa, peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Biringala yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa mengandakan anggaran yang di anggarkan melalui Dana Desa, setiap program yang ingin dilaksanakan itu pendanaannya bersumber dari Dana Desa yang ada di desa kami” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Biringala, 28 Mei 2024).

Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dapat digunakan untuk proyek lingkungan seperti pembangunan infrastruktur tahan iklim, pengelolaan air, dan energi terbarukan. Penggunaan yang efektif memerlukan perencanaan yang baik dan partisipasi masyarakat. Dana Desa juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program, peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Moncobalang yang mengatakan bahwa:

“Dalam menyediakan fasilitas pelaksanaan setiap program, sebenarnya semua sudah tertuang dalam penganggaran Dana Desa yang sudah diajukan jenis dan jumlahnya oleh seluruh desa yang ada di Kecamatan Barombong, oleh karenanya baik nominal ataupun jenisnya tidak bisa keluar dari apa yang sudah diajukan” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Moncobalang, 28 Mei 2024).

Sumber Daya Manusia

Memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia (SDM) di desa merupakan langkah kunci dalam mendukung pelaksanaan program Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan Iklim. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan dengan Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak perubahan iklim. Meningkatkan kapasitas Tim satgas bencana untuk berorganisasi dan bekerja sama dalam melaksanakan dan mengawasi program. Pelatihan SDM yang baik tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap program. Berikut adalah besaran anggaran yang digunakan untuk penanggulangan bencana di Kecamatan Barombong.

Tabel 4.7 Data pelatihan penanggulangan bencana

NO	Nama Desa	Jenis Pelatihan	Jumlah Anggaran	Tahun
1	Kanjilo	Pelatihan Penanganan Banjir	RP. 8.325.000	2023
2	Moncobalang	Pelatihan Damkar	RP. 36.666.000	2023
3	Tinggimae	Pelatihan Damkar	RP. 9.949.819	2023
4	Biringala	Pelatihan Damkar	RP. 8.500.000	2023
5	Tamanynyeleng	Pelatihan Penanganan Banjir	RP. 15.926.000	2023

Pembentukan tim satgas dan pelaksanaan pelatihan atau identifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan analisis kemampuan dan peran masing-masing kelompok SDM. Pelatihan dasar tentang perubahan iklim dan dampaknya, pelatihan teknis tentang praktik adaptasi dan mitigasi, pengembangan kapasitas manajerial dan kepemimpinan. Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Biringala yang mengatakan bahwa:

“Kepala Desa Biringala telah mengeluarkan SK Satgas relawan Damkar yang terdiri dari 15 orang dan memberikan pelatihan cara penggunaan peralatan damkar mini, pelatihan penanggulangan bencana ini dilakukan setiap tahunnya dan pelaksanaan pelatihan terakhir dilaksanakan pada tahun 2023 ” berikut Dokumentasi pelaksanaan pelatihan. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Biringala, 28 Mei 2024).



Pembentukan tim satgas dan pelaksanaan pelatihan dengan Membentuk kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan masyarakat untuk mengawasi implementasi program juga dilaksanakan oleh Desa Moncobalang, peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris Desa Moncobalang yang mengatakan bahwa:

“kami memfasilitasi pelaksanaan pelatihan pemberian materi kepada satgas penanganan bencana yang sudah di SK kan sebelumnya, pelatihannya dilaksanakan di salah satu hotel dimakassar yang Dimana sumber pendanaannya yaitu dianggarkan pada Dana Desa tahun anggaran 2023 ” berikut Dokumentasi pelaksanaan pelatihan. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Moncobalang, 28 Mei 2024).



Pelaksanaan pelatihan dan pemberian materi dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola program. Program edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya adaptasi perubahan iklim. Hal ini juga dilaksanakan oleh Desa Tinggimae yang dirangkaikan atau bekerja sama dengan Desa Kanjilo, Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Tinggimae yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pelatihan untuk tim satgas menyampaikan materi terkait penanganan bencana kami rangkai dengan desa kanjilo karena untuk mengefisienkan waktu melihat jarak desa kita yang tidak jauh serta tempat pelatihan yang lokasinya strategis berada ditengah-tengah Desa Tinggimae dengan Desa Kanjilo” berikut Dokumentasi pelaksanaan pelatihan. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tinggimae, 29 Mei 2024).





Pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM untuk Masyarakat setempat, Pelatihan yang tepat dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial SDM.juga dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tamanyyeleng peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Tamanyyeleng yang mengatakan bahwa:

“Di Desa Tamnyyeleng juga melaksnakan pelatihan penanganan bencana guna meningkatkan kualitas SDM satgas kami yang ad di Desa Tamanyyeleng ini pelatihan dihadiri oleh para satgas kami. Materi yang dibawakan adalah terkait damkar ” berikut Dokumentasi pelaksanaan pelatihan. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tamanyyeleng, 30 Mei 2024).





Dapat disimpulkan bahwa sudah ada upaya pemerintah Desa dalam meningkatkan dan menyediakan Sumber daya manusia yang berkualitas dengan memberdayakan tokoh Masyarakat, tokoh pemuda pemudi setempat. Diharapkan SDM dapat memberikan partisipasi dalam pelaksanaan program Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan iklim terutama pada wilayah kecamatan barombong.

Selain itu, Peran SDM dan SDA saja tidak cukup tanpa adanya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah untuk menunjang pelaksanaan program.

Sarana dan Prasaran

Sarana dan prasarana yang tepat dan memadai adalah dasar yang memungkinkan program Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan Iklim berjalan efektif dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya membantu dalam mitigasi dan adaptasi terhadap bencana, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat desa terhadap berbagai tantangan lingkungan sesuai dengan kondisi

lingkungan yang ada di desa tersebut. Berikut adalah sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah desa di Kecamatan Barombong.

Tabel 4.8 Sarana dan Prasarana

NO	Nama Desa	Sarana dan Prasarana	Anggaran
1	Kanjilo	<ul style="list-style-type: none"> • Papan penunjuk • Jalur evakuasi • Rompi tim relawan 	<ul style="list-style-type: none"> • RP. 3.500.000 • RP. 3.500.000 • RP. 2.500.000
2	Moncobalang	<ul style="list-style-type: none"> • Alat pemadam kebakaran mini • Papan penunjuk • Jalur evakuasi • Rompi tim relawan 	<ul style="list-style-type: none"> • RP. 1.000.000 • RP. 3.500.000 • RP. 3.500.000 • RP. 2.500.000
3	Tinggimae	<ul style="list-style-type: none"> • Alat pemadam kebakaran mini • Papan penunjuk • Jalur evakuasi • Rompi tim relawan 	<ul style="list-style-type: none"> • RP. 1.000.000 • RP. 3.500.000 • RP. 3.500.000 • RP. 2.500.000
4	Biringala	<ul style="list-style-type: none"> • Alat pemadam kebakaran mini • Papan penunjuk • Jalur evakuasi • Rompi tim relawan 	<ul style="list-style-type: none"> • RP. 1.000.000 • RP. 3.500.000 • RP. 3.500.000 • RP. 2.500.000
5	Tamanyyeleng	<ul style="list-style-type: none"> • Papan penunjuk • Jalur evakuasi • Rompi tim relawan • Pelampung • Tenda darurat 	<ul style="list-style-type: none"> • RP. 3.500.000 • RP. 3.500.000 • RP. 2.500.000 • RP. 5.000.000 • RP. 5.000.000

Sarana dan prasarana yang bisa dijangkau oleh anggaran

dari Dana Desa sangat terbatas ada beberapa sarana dan prasarana yang disediakan pihak pemerintah desa, peneliti

melakukan wawancara dengan Pendamping Lokal Desa yang mengatakan bahwa:

“Lima desa yang ada di kecamatan barombong sudah meganggarkan peralatan penanganan bencana, seperti alat pemadam kebakaran mini, pelampung, dan tenda darurat. Sarana dan prasarana yang disediakan cukup terbatas karena terhalang juga oleh Dana Desa” (Hasil wawancara dengan Pendamping Lokal Desa, 29 Mei 2024).

Sarana dan prasarana dalam penanganan bencana yang ada di desa cukup terbatas dan masih minim jumlahnya, Dengan optimalisasi sarana dan prasarana, program ini dapat meningkatkan ketahanan desa terhadap perubahan iklim dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Biringala yang mengatakan bahwa:

“Pada tahun 2023 kami membeli apar/alat pemadam kebakaran mini dengan harga 1.000.000, kemudian jug menyediakan seperti papan penunjuk, jalur evakuasi dan rompi untuk tim satgas bencana yang ada di desa biringala. Semua ini didanai oleh dana desa yang dianggarkan pada tahun anggaran 2023” berikut Dokumentasinya. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Biringala, 28 Mei 2024).



Melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana yang dibangun untuk memastikan fungsionalitas dan efektivitasnya dalam menghadapi perubahan iklim. Pemerintah Desa Tamannyeleng berupa pelampung dan Tenda darurat, Peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris Desa Tamannyeleng yang mengatakan bahwa:

“Di Desa kami tersedia pelampung dan tenda darurat yang bisa digunakan oleh Masyarakat ketika terjadi banjir, pelampung dan tenda darurat ini dibeli menggunakan Dana Desa, belum ada bantuan dari pihak lain terkait sarana dan prasarana penanganan bencana di desa kami” berikut Dokumentasinya. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tamannyeleng, 30 Mei 2024).



Semua Desa yang ada di Kecamatan Barombong sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program dan untuk bisa dimanfaatkan oleh Masyarakat yang membutuhkan. Semua sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah desa sumber pendanaannya dari Dana Desa, sejauh ini belum ada bantuan dari pihak lain yang didapatkan oleh pemerintah Desa.

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia, finansial/pendanaan dan kondisi sarana dan prasarana program yang mempengaruhi pelaksanaan diperoleh gambaran bisa dikatakan cukup untuk menunjang kesiapan program untuk penanganan bencana yang serius.

3) **Evaluasi Process**

Pelaksanaan kegiatan

Evaluasi proses dalam program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim bertujuan untuk menilai sejauh mana

Pelaksanaan kegiatan, Manajemen program dan Partisipasi Masyarakat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan program Desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim harus merujuk pada SOP yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat, berikut SOP umum pelaksanaan kegiatan kebencanaan di daerah Kecamatan Barombong:

Tabel 4.9 Standar Operasional Prosedur (SOP)

NO	Standar Operasional Prosedur (SOP)	
1	Pembentukan Tim Tanggap Bencana Desa	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pemilihan anggota tim dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan relawan. ○ Pelatihan dan penguatan kapasitas tim dalam penanganan bencana dan perubahan iklim.
2	Penyusunan Rencana Tanggap Darurat	<ul style="list-style-type: none"> ○ Identifikasi risiko bencana dan perubahan iklim yang mungkin terjadi di desa. ○ Penyusunan rencana tanggap darurat dan prosedur evakuasi.
3	Sosialisasi dan Edukasi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko bencana dan cara penanggulangnya. ○ Program edukasi terkait perubahan iklim dan dampaknya.
4	Evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pelaksanaan evakuasi sesuai dengan rencana yang telah disusun. ○ Penyediaan tempat evakuasi sementara

		yang aman dan memenuhi kebutuhan dasar.
5	Penyediaan Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Distribusi bantuan darurat seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan perlengkapan kebersihan. ○ Koordinasi dengan lembaga pemerintah, LSM, dan pihak-pihak lain untuk bantuan tambahan.
6	Evaluasi dan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> ○ Evaluasi pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan. ○ Penyusunan rekomendasi untuk perbaikan SOP di masa mendatang.

Rekomendasi program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang ada di Kec Barombong bersumber dari hasil inputan dari pemerintah desa kedalam sistem informasi desa oleh karena itu muncul program yang direkomendasikan. Semua program yang dilaksanakan memiliki tujuan dan aturan pelaksanaan yang masih berpedoman pada SOP secara umum, peneliti melakukan wawancara dengan Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Barombong yang mengatakan bahwa:

“Sejauh ini hampir semua program dijalankan oleh 5 Desa yang ada di Kecamatan Barombong ini, penanganan bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim merupakan tujuan utama kita sebagai pemerintah. Setiap program merujuk pada aturan-aturan yang telah disepakati bersama” (Hasil wawancara dengan

Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Barombong, 28 Mei 2024).

Proses penanganan bencana sudah dipersiapkan oleh pemerintah Desa dan jika sewaktu-waktu terjadi bencana maka proses penanganannya sudah diatur, Membuat rencana aksi yang komprehensif berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan. Mengembangkan rencana aksi yang mencakup tujuan jangka pendek, menengah, dan Panjang. Menyusun jadwal pelaksanaan dan menetapkan tanggung jawab. Peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris Desa Moncobalang yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa moncobalang sudah menyediakan jalur-jalur evakuasi dan titik kumpul Ketika terjadi bencana di wilayah Desa Moncobalang. Masyarakat akan diarahkan kesatu tempat untuk kemudian mendapatkan pertolongan hal ini dilakukan untuk mempermudah proses evakuasi dan memastikan dapat terjangkau ke seluruh RT” Berikut Dokumentasinya. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Moncobalang, 28 Mei 2024).



Proses pelaksanaan program tidak terlepas dari rencana-rencana awal yang memiliki tujuan untuk direalisasikan, salah satu bentuk proses pelaksanaannya yaitu 5 desa sudah menyiapkan jalur evakuasi, peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris Desa Biringala yang mengatakan bahwa:

“Semua desa yang ada di kecamatan barombong sudah mengatur jalur-jalur evakuasi untuk mempermudah Masyarakat Ketika terjadi bencana, tidak hanya di desa biringala namun empat desa lainnya pun sudah memberikan aturan pada jalur evakuasi” Berikut Dokumentasinya. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Biringala, 28 Mei 2024).



Pelaksanaan program ini sudah bisa terlihat perkembangannya tidak hanya pada fokus penanganan bencana tetapi juga mencoba memperbaiki lingkungan dengan melakukan penghijauan jalan lingkungan, Dengan pelaksanaan yang terstruktur dan didukung oleh partisipasi aktif masyarakat serta kolaborasi yang efektif, program ini dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan ketahanan desa terhadap

perubahan iklim dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat. Peneliti melakukan wawancara dengan pendamping lokal desa yang mengatakan bahwa:

“Sejauh ini pelaksanaan program sudah menunjukkan progresnya dan mungkin mulai terlihat manfaatnya, akan tetapi tidak semua desa di ke barombong melakukan penghijauan jalan, salah satu desa yang melakukan penghijauan jalan lingkungan yaitu Desa Biringala” Berikut Dokumentasi. (Hasil wawancara Pendamping Lokal Desa, 29 Mei 2024).



Manajemen program

Program manajemen desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim di desa melibatkan berbagai strategi dan kegiatan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada warga desa tentang perubahan iklim, dampaknya, dan bagaimana mereka bisa beradaptasi dan mengurangi risiko.
- 2) Mengimplementasikan praktik pengelolaan yang berkelanjutan untuk tanah, air, dan sumber daya alam lainnya. Ini bisa mencakup penghijauan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan konservasi air.
- 3) Membangun atau meningkatkan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem, seperti tanggul, sistem drainase, dan bangunan yang tahan gempa. Menggunakan teknologi untuk pemantauan cuaca dan peringatan dini.
- 4) Mengembangkan rencana tanggap darurat dan latihan simulasi bencana untuk memastikan bahwa masyarakat siap menghadapi situasi darurat. Ini bisa meliputi pelatihan relawan lokal, penyediaan perlengkapan darurat, dan pengembangan sistem peringatan dini.
- 5) Membangun kapasitas institusi lokal untuk mengelola risiko iklim dan bencana, termasuk peningkatan koordinasi antara pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
- 6) Mendorong diversifikasi ekonomi di desa agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu sumber penghasilan yang mungkin rentan terhadap perubahan iklim. Ini bisa

mencakup pengembangan usaha kecil, pariwisata berbasis komunitas, atau sektor lain yang berkelanjutan.

Manajemen program desa tanggap terhadap pengendalian dan perubahan iklim dapat dilakukan melalui berbagai bentuk inisiatif dan strategi, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa program tersebut dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Tinggimae yang mengatakan bahwa:

“Salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah desa yaitu memberikan edukasi dan peningkatan kesadaran Masyarakat dengan Pembentukan kelompok kerja atau komunitas peduli iklim yang aktif dalam kegiatan edukasi dan aksi lingkungan” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tinggimae, 29 Mei 2024).

Pemerintah perlu menerapkan pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan dan sosial serta melakukan inovasi sebagai bentuk inisiatif dalam mengelola program yang sedang dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan, peneliti melakukan wawancara dengan, Sekretaris Desa Biringala yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat setempat juga di edukasi untuk pengelolaan air yang efisien, termasuk pembuatan sistem irigasi pada jalu-jalur tertentu untuk dialiri air baik itu di persawahan atau perumahan” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Biringala, 28 Mei 2024).

Selain memberikan edukasi pemerintah harus memberikan contoh kepada Masyarakat setempat, contoh yang bisa memberikan Gambaran kepada Masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, peneliti melakukan wawancara dengan Pendamping Lokal Desa yang mengatakan bahwa:

“Beberapa desa sudah mulai melakukan penghijauan di jalan-jalan umum untuk meningkatkan serapan karbon dan mencegah terjadinya luapan air yang bisa mengakibatkan banjir, penghijauan lingkungan ini akan terus ditingkatkan di Kecamatan Barombong ini” (Hasil wawancara dengan Pendamping Lokal Desa, 29 Mei 2024).

Implementasi dari bentuk-bentuk manajemen ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah desa, Masyarakat dan Lembaga lainnya. Dengan kerjasama yang baik, program-program tersebut dapat meningkatkan ketahanan desa terhadap dampak perubahan iklim serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat setempat.

Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan program tersebut bentuk partisipasi Masyarakat yang paling terlihat adalah terbentuknya Tim satgas penanganan bencana yang ada di 5 Desa, setiap desa memiliki tim/relawan bencana yang bertugas selama dan setelah bencana, mengikuti pelatihan khusus untuk relawan, seperti

pemadam kebakaran, pertolongan pertama, dan penyelamatan.

Berikut jumlah tim satgas yang ada di setiap desa:

Tabel 4.10 Jumlah Tim Satgas Bencana

NO	Nama Desa	Jumlah Tim Satgas Bencana
1	Kanjilo	20 Orang
2	Moncobalang	20 Orang
3	Tinggimae	20 Orang
4	Biringala	15 Orang
5	Tamanyseleng	25 Orang

Segala bentuk inovasi yang dilakukan tidak terlepas dari keterlibatan Masyarakat, Partisipasi masyarakat sangat penting dalam keberhasilan program desa tanggap terhadap pengendalian dan perubahan iklim. Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Barombong yang mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal dapat dilihat pada saat musyawarah Desa, Masyarakat diundang untuk berpartisipasi dalam rapat dan diskusi untuk merumuskan program-program lingkungan yang akan dijalankan” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Barombong, 30 Mei 2024).

Aksi Kolektif dan Pelaksanaan Program, Masyarakat dapat terlibat langsung dalam aksi-aksi nyata dan pelaksanaan program-program lingkungan. Melibatkan masyarakat sejak

tahap awal perencanaan untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka. Mengadakan forum diskusi atau survei untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat. Mengidentifikasi perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk petani, nelayan, perempuan, dan pemuda. Peneliti melakukan wawancara dengan Pendamping Lokal Desa yang mengatakan bahwa:

“Gotong Royong Masyarakat secara kolektif berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan, pembersihan irigasi, atau pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Selain itu masyarakat ikut serta dalam pelatihan tentang penanganan bencana berkelanjutan dan penggunaan alat-alat penanggulangan bencana yang ada di desa” (Hasil wawancara dengan Pendamping Lokal Desa, 29 Mei 2024).

Mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program. Membentuk kelompok kerja berbasis masyarakat untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan lapangan. Mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan seperti penanaman pohon, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat berperan dalam menyebarkan informasi dan mengedukasi sesama warga tentang pentingnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Moncobalang yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat terlibat dalam sosialisasi tentang perubahan iklim melalui tim satgas bencana yang sudah mendapatkan edukasi sebelumnya dalam pelatihan, salah satu tugas tim satgas yaitu memberikan informasi kepada Masyarakat yang lain dari apa yang sudah didapatkan sebelumnya” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Moncobalang, 29 Mei 2024).

Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dalam proses pelaksanaan suatu program khususnya program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan desa dalam menghadapi perubahan iklim, kegiatan-kegiatan yang direncanakan diharapkan terlaksana dengan baik. Semua program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa merupakan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya dan tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah setempat. Pelaksanaan program tidak bisa terlepas dari koordinasi pihak-pihak atau partisipasi dari Masyarakat setempat untuk membantu pemerintah desa dalam mengembangkan dan mengenali lebih lanjut kebutuhan-kebutuhan pelaksanaan program yang lebih baik kedepannya untuk menanggapi dampak perubahan iklim yang ada di Kecamatan Barombong. Dengan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim, keberlanjutan program dapat terjamin, dan dampaknya akan lebih signifikan serta berkelanjutan.

4) Evaluasi *Product*

Pencapaian Tujuan program

Evaluasi produk dalam program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim bertujuan untuk menilai Pencapaian Tujuan program, Dampak jangka pendek maupun Dampak jangka panjang. pencapaian tujuan desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim merupakan bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan bantuan dari Masyarakat setempat. Ada lima program yang sedang dilaksanakan oleh semua desa yang ada di Kecamatan Barombong dengan pencapaian tujuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi tentang bencana di setiap Desa: memberikan informasi terkait kebencanaan pada masyarakat
2. Pembentukan Tim Tanggap Darurat Desa : Pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab untuk menangani situasi darurat, seperti bencana alam, dengan cepat dan efisien.
3. Pelatihan dan Edukasi Masyarakat: Program pelatihan dan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pengendalian perubahan iklim, cara-cara mitigasi bencana, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

4. Pembuatan jalur evakuasi bencana Desa: setiap desa sudah menentukan jalur-jalur evakuasi
5. Pengadaan sarana tanggap darurat desa: pengadaan sarana dan prasarana seperti alat pemadam kebakaran mini, pelampung dan tenda darurat.
6. Pengembangan Infrastruktur Hijau: Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti penanaman pohon, dan sistem irigasi yang efisien dan berkelanjutan.

Adapun program yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa yang ada Di Kecamatan Barombong yaitu, pelaksanaan MOU dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.

Evaluasi ini bisa menghasilkan berbagai macam output yang penting untuk memahami dampak program dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Ada enam program yang direkomendasikan oleh Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Barombong yang mengatakan bahwa:

“Sejauh ini program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah bisa dikatakan memberikan dampak positif seperti menghasilkan tim-tim satgas penanganan bencana sebagai perpanjangan pemerintah setempat dalam membantu Masyarakat, meskipun sarana dan prasarananya masih terbatas serta SDM yang masih

perlu dukungan pengetahuan” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Barombong, 30 Mei 2024).

Program yang dilaksanakan sedikit banyaknya memberikan pengaruh pada ketahanan lingkungan di desa, Peningkatan kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati untuk mengatasi ancaman jangka panjang seperti deforestasi dan perubahan penggunaan lahan. Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Biringala yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Biringala sudah melakukan penghijauan jalanan dengan menanam pohon disepanjang jalan desa wisata, meskipun belum semua fasilitas jalanan umum di desa biringala ini dilakukan penghijauan akan tetapi nantinya akan lebih dimaksimalkan” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Biringala, 28 Mei 2024).

Hasil dari pelaksanaan program juga sudah memberikan manfaat kepada masyarakat, Masyarakat lebih terampil dan menerapkan praktik adaptasi seperti penggunaan teknologi penanganan/mitigasi bencana yang ada di desa dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Kanjio yang mengatakan bahwa:

“Pada saat banjir melanda desa kami yaitu sekitar tahun 2022 kami disini melakukan evakuasi dengan baik karena sudah ada jalur-jalur evakuasi, tempat evakuasi dan tenaga tim satgas yang membantu, artinya sedikit banyaknya sudah memberikan dampak positif bagi pemerintah maupun Masyarakat meskipun masih menggunakan peralatan seadanya” sarana dan prasarana

masih cukup jauh dari kata memadai, seperti alat damkar yang masih minim dan menggunakan damkar kecil, perahu karet yang belum ada dan itu dibutuhkan apabila terjadi banjir yang tinggi, jumlah pelampung yang masih sedikit dan beberapa program lain yang membutuhkan tambahan peralatan” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Kanjilo, 29 Mei 2024).

Kerjasama dengan pemerintah daerah seperti BPBD Kabupaten, Dinas lingkungan hidup dan instansi lainnya juga belum tertuang secara tertulis dan belum ada aturan-aturan yang mengikat antara Pemerintah Desa dengan pemerintah daerah, peneliti melakukan wawancara dengan pendamping lokal desa yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa dengan pemerintah daerah sejauh ini belum ada MOU tetapi jika dibutuhkan dan dihubungi pemerintah daerah setempat seperti BPBD akan membantu pemerintah desa namun perlu juga adanya MOU resmi sesuai dengan rekomendasi program untuk pemerintah desa dan ini yang menjadi kendala karena belum ada di desa yang memiliki itu ” (Hasil wawancara dengan Pendamping Lokal Desa, 29 Mei 2024).

Perlu adanya MOU yang jelas antar instansi yang terlibat dalam mencapai tujuan Desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim terutama bagi pemerintah daerah yang membawahi Kecamatan Barombong.

Dampak Jangka Panjang

Pelaksanaan program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim memiliki dampak jangka panjang yang signifikan bagi desa, Pelaksanaan program desa yang tanggap terhadap pengendalian dan perubahan iklim memiliki berbagai

dampak yang dapat dirasakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Peneiti melakukan wawancara dengan Koordinator Pendamping Desa Kecamatan yang mengatakan bahwa:

“Dampak jangka panjang desa menjadi lebih mampu mengatasi perubahan cuaca ekstrem, kekeringan, dan banjir, sehingga mengurangi kerugian ekonomi dan sosial. Infrastruktur yang dibangun, seperti sistem irigasi dan akan meningkatkan ketahanan desa terhadap perubahan iklim” (Hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Barombong, 28 Mei 2024).

Edukasi dan keterlibatan masyarakat dalam program lingkungan akan berdampak pada membentuk budaya yang lebih peduli terhadap lingkungan dan berkelanjutan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program terkait perubahan iklim, Kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana iklim. Masyarakat yang lebih siap dan tanggap dalam menghadapi perubahan iklim, serta lebih berdaya dalam pengambilan keputusan. Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Kanjilo yang mengatakan bahwa:

“Terciptanya budaya gotong royong dalam menjaga lingkungan, peningkatan kesadaran akan pentingnya kelestarian alam, dan perubahan pola pikir Masyarakat setempat yang mendukung tindakan pro lingkungan” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Kanjilo, 29 Mei 2024).

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat menciptakan peluang ekonomi baru dan mengurangi kerugian

akibat bencana dilingkungan Masyarakat, Kesejahteraan ekonomi yang lebih stabil dan peningkatan kualitas hidup. Mendorong inovasi dan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Peneliti melakukan wawancara dengan Pendamping Lokal Desa yang mengatakan bahwa:

“Dampak kesejahteraan ekonomi yang bisa dirasakan oleh Masyarakat yaitu mengurangi kerugian ekonomi akibat terjadinya bencana, artinya meminimalisir adanya korban seperti korban bencana banjir, kebakaran dan lainnya yang bisa memberikan kerugian kepada Masyarakat yang terdampak” (Hasil wawancara dengan Pendamping Lokal Desa, 29 Mei 2024).

Implementasi yang konsisten dan dukungan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa dampak jangka panjang dari program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim dapat tercapai secara maksimal.

Dampak Jangka Pendek

Dampak jangka pendek atau yang dirasakan oleh masyarakat dari implementasi program ini dapat beragam dan mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan institusional yang menunjukkan bagaimana program ini mempengaruhi desa dalam waktu singkat. Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Kanjilo yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat mendapatkan pengetahuan lebih tentang perubahan iklim, dampaknya, dan cara-cara mitigasi serta adaptasi melalui program edukasi dan pelatihan. Kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan meningkat, sehingga masyarakat lebih aktif dalam upaya pelestarian lingkungan” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Kanjilo, 29 Mei 2024).

Semua kegiatan mitigasi/penanganan bencana yang diterapkan saat ini secara tidak langsung memberikan dampak yang baik bagi Masyarakat setempat. Kesadaran dan partisipasi masyarakat meningkat, namun perlu menjaga keberlanjutan. Lingkungan lebih bersih dengan pengelolaan sampah yang lebih baik, namun konsistensi perlu ditingkatkan. Peneliti melakukan wawancara dengan Pendamping Lokal Desa yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat lebih siap menghadapi bencana alam melalui penyusunan rencana darurat, pelatihan evakuasi, dan pembangunan infrastruktur tahan bencana. Implementasi sistem peringatan dini untuk bencana seperti banjir dan bencana lainnya” (Hasil wawancara dengan Pendamping Lokal Desa, 29 Mei 2024).

Memastikan kebijakan diterapkan secara konsisten dan efektif. Kebijakan lokal yang mendukung keberhasilan program dan kepatuhan masyarakat yang meningkat. Kebijakan-kebijakan yang ada memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan program di Kecamatan Barombong ini, Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Tinggimae yang mengatakan bahwa:

“Kebijakan yang pro terhadap lingkungan, Adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat desa menjadikan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik yang merusak lingkungan seperti illegal yang tidak bisa dilakukan demi menjaga kelestarian lingkungan” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tinggimae, 29 Mei 2024).

Program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim di kecamatan barombong ini masih memiliki beberapa kendala baik itu kendala kurangnya kualitas SDM, finansial, sarana dan prasarana yang belum lengkap sehingga hasil dari pelaksanaannya tidak maksimal dan masih ada program yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Keluaran yang dihasilkan dalam pelaksanaan program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim menjadi Penilaian untuk Mengukur sejauh mana tujuan program telah tercapai terutama untuk kecamatan barombong, belum semua rekomendasi program-program dilaksanakan. Desa dapat merasakan manfaat yang signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang akan meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan mereka di tengah tantangan perubahan iklim. Hasil evaluasi ini sangat penting untuk memberikan umpan balik serta usulan kepada pemerintah desa untuk lebih memaksimalkan, memperbaiki kelemahan, dan memastikan bahwa program desa tanggap pengendalian dan perubahan

iklim dapat mencapai tujuannya secara efektif dan berkelanjutan.

b. Efektifitas pelaksanaan Program Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan Iklim di Kabupaten Gowa

Analisis karakteristik berdasarkan beberapa karakteristik dasar seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan, yang digunakan peneliti dalam analisis deskriptif untuk memahami profil dasar dari responden. Persentase dihitung berdasarkan jumlah total responden yaitu 100 orang. Berikut tabel karakteristik responden:

Tabel 4.11 Deskriptif Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi (n)	Jumlah Responden (N)	%
Jenis Kelamin	Laki-laki	32	100	32%
	Perempuan	68	100	68%
Usia	< 20 Tahun	6	100	6%
	20-29 Tahun	25	100	25%
	30-39 Tahun	45	100	45%
	40-49 Tahun	20	100	20%
	≥ 50 Tahun	4	100	4%
Pendidikan	S2	7	100	7%
	S1	55	100	55%
	SMA/SMK	35	100	35%
	SMP	3	100	3%

Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa	15	100	15%
	Aparat Desa	35	100	35%
	Pegawai Negeri	7	100	7%
	Wiraswasta	13	100	13%
	Lainnya	30	100	30%

Dari tabel di atas tampak bahwa karakteristik responden pada 5 lokasi yaitu dominan pada responden perempuan dengan persentase 68%, Usia terbanyak responden yaitu pada usia 30-39 Tahun dengan Tingkat pendidikan lebih dominan S1 dengan persentase 55%, dan profesi/pekerjaan Aparat Desa dengan jumlah 35%. Dengan demikian, penelitian karakteristik responden adalah langkah penting dalam memastikan bahwa hasil penelitian akurat, valid, dan dapat diterapkan secara luas.

Indikator pertama bertujuan untuk mengukur tujuan yang terdefinisi dan Indikator Kinerja, berikut tabel analisis data indikator X1 dengan jumlah responden 100 dari 5 desa di Kec Barombong.

Tabel. 4.12 Analisis deskriptif berdasarkan indikator tujuan dan indikator yang jelas (X1)

Nilai	Tujuan dan Indikator Yang Jelas			
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4
Desa Biringala	62	63	62	58
Desa Moncobalang	62	62	62	57
Desa Tinggimae	39	40	40	45
Desa Kanjilo	60	59	62	55
Desa Tamanyyeleng	39	37	38	46
Jumlah Skor	262	261	264	261
Rata-rata	65,5	65,25	66	65,25
Kategori	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Dari tabel di atas tampak bahwa X1.3 atau tujuan dan indikator keberhasilan program ini realistis dan dapat dicapai yang diteliti pada 5 lokasi berada pada skor tertinggi (66), sedangkan X1.1, X1.2 menunjukkan angka yang sama yaitu 65,25. Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kecenderungan indikator yang pertama atau tujuan dan indikator yang jelas berada pada kategori Efektif.

Indikator kedua bertujuan untuk mengukur partisipasi aktif serta komunikasi dan koordinasi berikut tabel analisis data indikator X2 dengan jumlah responden 100 dari 5 desa di Kec Barombong.

Tabel. 4.13 Analisis deskriptif berdasarkan Indikator keterlibatan *stakeholder* (X2)

Nilai	Keterlibatan <i>Stakeholder</i>			
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4
Desa Biringala	59	46	56	57
Desa Moncobalang	59	45	58	57
Desa Tinggimae	46	43	46	45
Desa Kanjilo	56	46	55	56
Desa Tamanyyeleng	46	44	45	44
Jumlah Skor	266	224	260	259
Rata-rata	66,5	56	65	64,75
Kategori	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Dari tabel di atas tampak bahwa X2.1 atau Para *stakeholder* terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program yang diteliti pada 5 lokasi berada pada Skor tertinggi (66,5), sedangkan X2.2 atau lembaga non pemerintah juga dilibatkan dengan baik dalam program ini menunjukkan angka yang paling rendah yaitu 56. Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kecenderungan indikator yang kedua atau keterlibatan *stakeholder* berada pada kategori Efektif.

Indikator ketiga bertujuan untuk mengukur ketersediaan sumber daya serta kapasitas dan kompetensi, berikut tabel analisis data indikator X3 dengan jumlah responden 100 dari 5 desa di Kec Barombong.

Tabel. 4.14 Analisis deskriptif berdasarkan indikator sumber daya dan kapsitas (X3)

Nilai	Sumber Daya dan Kapasitas			
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4
Desa Biringala	57	56	56	57
Desa Moncobalang	58	58	55	56
Desa Tinggimae	47	45	43	42
Desa Kanjilo	55	53	54	52
Desa Tamanyyeleng	43	43	43	43
Jumlah Skor	260	255	251	250
Rataa-rata	65	63,75	62,75	62,5
Kategori	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Dari tabel di atas tampak bahwa X3.1 atau sumber daya yang tersedia untuk program ini cukup untuk mencapai tujuan yang diteliti pada 5 lokasi berada pada skor tertinggi (65), sedangkan skor terendah yaitu X3.4 atau Dukungan manajemen dalam penyediaan sumber daya sangat memadai menunjukkan angka 62,5. Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kecenderungan indikator

yang kedua atau keterlibatan *stakeholder* berada pada kategori Efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas program dalam penelitian ini diukur berdasarkan tiga indikator yaitu, tujuan dan indikator yang jelas, keterlibatan *stakeholder*, sumber daya dan kapasitas.

Tabel. 4.15 Analisis Deskriptif berdasarkan Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Efektifitas

Nilai	Indikator		
	Tujuan dan Indikator Yang Jelas (X1)	Keterlibatan <i>Stakeholder</i> (X2)	Sumber Daya dan Kapasitas (X3)
Jumlah Skor	1048	1009	1016
/4	262	252	254
Rata-rata	65,5	63	63,5
Kategori	Efektif	Efektif	Efektif

Dari tabel di atas tampak bahwa ketiga Indikator yang diteliti pada 5 lokasi berada pada kategori baik, namun bila dilihat secara parsial, keterlibatan *stakeholder* (X2) 63 menunjukkan skor yang paling rendah, sedangkan indikator sumber daya dan kapasitas (X3) 63,5 dalam mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program, sedangkan indikator X1 atau tujuan dan indikator yang jelas

menjadi indikator yang paling tinggi dengan skor 65,5. Jika dirata-ratakan data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kecenderungan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas berada pada katgori efektif.

C. PEMBAHASAN

a. Evaluasi model CIPP Pada Program Desa Tanggap Pengendalian dan perubahan iklim

1. Evaluasi *Context*

Evaluasi *Context* pada penanganan Perubahan iklim adalah langkah awal dalam model evaluasi CIPP yang bertujuan untuk memahami tujuan, kebutuhan, masalah, serta kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan program penanganan perubahan iklim/ bencana.

Secara umum program ini bertujuan untuk membantu menangan dan mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu terjadi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim yang tidak dapat terhindarkan olehnya itu pemerintah perlu mengantisipasi dengan menerapkan program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim.

Kebutuhan Kerjasama sangat mempengaruhi pelaksanaan program, Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Barombong harus memberikan perhatian pada alur Kerjasama yang baik dengan pemerintah yang lebih diatas, karena bukan hanya

menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk memastikan setiap keadaan yang diakibatkan oleh perubahan iklim bisa dikendalikan dengan baik dan nyata bentuk penanganan yang diberikan agar Masyarakat bisa merasakan kehadiran pelayanan dan perhatian dari pemerintah.

Dukungan kebijakan yang ada dalam menunjang pelaksanaan program merujuk pada peraturan Menteri baik itu Menteri keuangan ataupun Menteri desa terkait penggunaan dana desa untuk kegiatan tersebut karena itu yang akan menjadi rujukan pemerintah desa dalam menganggarkan kegiatan-kegiatan penanganan, peraturan Menteri keuangan Nomor 145 dan 146 tahun 2023 dan untuk peraturan Menteri desa tentang legalitas penggunaan dana desa Nomor 7 Tahun 2023 dan peraturan kepala Desa Setempat dalam mengatur pelaksanaan program.

Dalam pelaksanaan program ini setiap desa menghadapi lingkungan yang kemungkinan terjadi bencana yang berbeda-beda pada setiap desa, Jenis bencana yang memungkinkan akan terjadi saat cuaca panas yaitu kebakaran dan angin kencang yang pernah terjadi di Desa Biringala, Pemerintah sudah mengenali karakteristik lingkungan di wilayahnya masing-masing oleh karenanya program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim ini dilaksanakan sesuai kebutuhan lingkungan di desa masing-masing. Walaupun

kadang tidak bisa terlepas dari jenis-jenis bencana yang lain akibat adanya perubahan iklim yang semakin tidak menentu.

Dapat disimpulkan bahwa dalam evaluasi *Context* pada program Desa tanggap pengendalian perubahan iklim yang ada di kecamatan barombong dengan tujuannya untuk memahami tujuan dari pelaksanaan program yang yaitu untuk membantu menangani dan mempersiapkan jika sewaktu-waktu terjadi bencana di Desa masing-masing yang disebabkan oleh perubahan iklim yang tidak dapat dihindarkan, kondisi lingkungan yang tidak menentu dapat mempengaruhi pelaksanaan program penanganan perubahan iklim di Kecamatan Barombong. Program yang dilaksanakan berupa sosialisasi kepada Masyarakat terkait penanganan bencana yang berbeda-beda di setiap desa ada yang berfokus pada penanganan banjir karena daerahnya yang rawan terjadi banjir serta adapula yang berfokus pada kejadian-kejadian seperti kebakaran pemerintah setempat harus memahami karakteristik lingkungan yang ada serta menerapkan program sesuai dengan jenis bencana yang sering terjadi agar bisa mencapai target terhadap Desa Tanggap pengendalian dan perubahan iklim, yaitu Indeks ratio bencana (IRT) mencapai 0 diseluruh RT, dan penanganan/mitigasi resiko bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT.

2. Evaluasi *Input*

Evaluasi *input* adalah bagian penting dari proses evaluasi program. Evaluasi input membantu mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan memungkinkan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan agar program dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan program Desa Tanggap pengendalian dan perubahan iklim di kecamatan barombong pemerintah setempat perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memberikan pelatihan-pelatihan terkait penanganan bencana. Pembentukan tim satgas dan pelaksanaan pelatihan sudah dilakukan kelima Desa Di Kecamatan Barombong dengan jenis pemberian materi penanganan bencana kebakaran dan banjir untuk meningkatkan kapasitas SDM.

Dapat disimpulkan bahwa sudah ada upaya pemerintah Desa dalam meningkatkan dan menyediakan Sumber daya manusia yang berkualitas dengan memberdayakan tokoh Masyarakat, tokoh pemuda pemudi setempat. Diharapkan SDM dapat memberikan partisipasi dalam pelaksanaan program Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan iklim terutama pada wilayah kecamatan barombong.

Selain itu, Peran SDM saja tidak cukup tanpa adanya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah untuk menunjang pelaksanaan program. Sarana dan prasarana yang bisa dijangkau

oleh anggaran dari Dana Desa sangat terbatas ada beberapa sarana dan prasarana yang disediakan pihak pemerintah desa.

Semua Desa yang ada di Kecamatan Barombong sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program dan untuk bisa dimanfaatkan oleh Masyarakat yang membutuhkan. Semua sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah desa sumber pendanaannya dari Dana Desa, sejauh ini belum ada bantuan dari pihak lain yang didapatkan oleh pemerintah Desa sedangkan jumlah Sarana dan prasarana dalam penanganan bencana yang ada di desa cukup terbatas dan masih jauh dari kata cukup. Dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia, finansial/ pendanaan dan kondisi program yang mempengaruhi pelaksanaan diperoleh gambaran bisa dikatakan cukup untuk menunjang kesiapan program.

3. Evaluasi *Process*

Evaluasi proses dalam program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim bertujuan untuk menilai sejauh mana program tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Rekomendasi program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang ada di Kec Barombong bersumber dari hasil inputan dari pemerintah desa kedalam sistem informasi desa oleh karena itu muncul program yang direkomendasikan. sejauh ini hampir semua program dijalankan oleh 5 Desa yang ada di

Kecamatan Barombong ini, penanganan bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

Proses pelaksanaan program tidak terlepas dari rencana-rencana awal yang memiliki tujuan untuk direalisasikan, salah satu bentuk proses pelaksanaannya yaitu 5 desa sudah menyiapkan jalur evakuasi, untuk mempermudah Masyarakat Ketika terjadi bencana, tidak hanya di desa biringala namun empat desa lainnya pun sudah memberikan aturan pada jalur evakuasi.

Pelaksanaan program ini sudah bisa terlihat perkembangannya tidak hanya pada fokus penanganan bencana tetapi juga mencoba memperbaiki lingkungan dengan melakukan penghijauan jalan lingkungan, pelaksanaan program ini sudah menunjukkan progresnya dan mungkin mulai terlihat manfaatnya, akan tetapi tidak semua desa di ke barombong melakukan penghijauan jalan, salah satu desa yang melakukan penghijauan jalan lingkungan yaitu Desa Biringala.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dalam proses pelaksanaan suatu program khususnya program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan desa dalam menghadapi perubahan iklim, kegiatan-kegiatan yang direncanakan diharapkan terlaksana dengan baik. Semua program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa merupakan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya

dan tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah setempat. Pelaksanaan program tidak bisa terlepas dari koordinasi pihak-pihak atau partisipasi dari Masyarakat setempat untuk membantu pemerintah desa dalam mengembangkan dan mengenali lebih lanjut kebutuhan-kebutuhan pelaksanaan program yang lebih baik kedepannya untuk menanggapi dampak perubahan iklim yang ada di Kecamatan Barombong.

4. Evaluasi *Product*

Evaluasi produk dalam program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan inisiatif yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini bisa menghasilkan berbagai macam output yang penting untuk memahami dampak program dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Hasil dari pelaksanaan program memberikan manfaat kepada masyarakat, pada saat banjir melanda di desa sudah ada tim satgas yang melakukan evakuasi dengan baik dan sudah ada jalur-jalur evakuasi serta tempat evakuasi, artinya sedikit banyaknya sudah memberikan dampak positif bagi pemerintah maupun Masyarakat meskipun masih menggunakan peralatan seadanya.

Sarana dan prasarana sangat menunjang keberhasilan pelaksanaan program, dalam program yg dijalankan untuk desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim di kecamatan

barombong ini masing cukup minim, selain itu Kerjasama dengan pemerintah daerah seperti BPBD Kabupaten, Dinas lingkungan hidup dan instansi lainnya juga belum tertuang secara tertulis dan belum ada aturan-aturan yang mengikat antara Pemerintah Desa dengan pemerintah daerah.

Program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim di kecamatan barombong ini masih memiliki beberapa kendala baik itu kendala kurangnya kualitas SDM, finansial, sarana dan prasarana yang belum lengkap sehingga hasil dari pelaksanaannya tidak maksimal dan masih ada program yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa. Keluaran yang dihasilkan dalam pelaksanaan program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim menjadi Penilaian untuk Mengukur sejauh mana tujuan program telah tercapai terutama untuk kecamatan barombong, belum semua rekomendasi program-program dilaksanakan. Desa dapat merasakan manfaat yang signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang akan meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan mereka di tengah tantangan perubahan iklim. Hasil evaluasi ini sangat penting untuk memberikan umpan balik serta usulan kepada pemerintah desa untuk lebih memaksimalkan, memperbaiki kelemahan, dan memastikan bahwa program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim dapat mencapai tujuannya secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi diatas secara keseluruhan jika dibandingkan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini didapatkan hasil penelitian yaitu pertama, Lola Malihah (Tahun 2022) Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kerusakan pada lingkungan menjadi isu yang paling sering dibicarakan pada Negara-negara di dunia. Pemanasan global dan Perubahan iklim adalah kondisi yang menandakan kerusakan tersebut. Upaya-upaya dan kebijakan yang diterapkan beberapa negara bertujuan untuk mengurangi dampak tersebut di tingkat internasional, beberapa negara sudah menjalankan kebijakan tersebut, hal ini sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Kemudian kedua, peneliti Akhmad Fauzy, dkk (Tahun 2019) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Penanggulangan Bencana. Hasil penelitian dikatakan bahwa TPB dimaksudkan untuk memberikan gambaran-gambaran terhadap sektor strategis pada pembangunan. Tentunya menjadi sasaran dengan memperhatikan sumber daya ataupun potensi yang ada di setiap wilayah. Masing-masing wilayah memiliki karakter fisik dan sosial yang berbeda. Selanjutnya ketiga, peneliti Dewi Luqmania, dkk (Tahun 2022) MAS KLIMIS (Masyarakat Peduli Iklim Yang Harmonis) Kendaraan PT PJB UP Gresik Dalam

Mewujudkan Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Hasil penelitian menyatakan bahwa Berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR PT PJB UP Gresik, sebagai pihak industri melalui Program MAS KLIMIS (Masyarakat Peduli Iklim yang Harmonis) merupakan salah satu upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Program tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan seperti, membangun kesadaran bersama, melakukan kajian serta aksi bersama, serta melakukan monitoring dan evaluasi bersama untuk membangun kemandirian masyarakat. Demikian pula keikutsertaan para pemangku kepentingan dalam proses menangani isu lingkungan menjadi hal yang penting untuk mencapai tujuan bersama.

Hasil penelitian dari Gindo Leontinus R. Siringoringo (Tahun 2022) Program Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terhadap Masalah Perubahan Iklim Di Indonesia. Hasil penelitiannya yaitu Paradigma SDGs memasukkan nilai-nilai ekonomi, sosial, dan ekologi serta lingkungan ataupun irisan ke 3 aspek tersebut (ekonomi, sosial, dan lingkungan). Perubahan iklim merupakan proses fisis, tapi perlu dipahami juga secara sosial ekonomi. Fenomena perubahan iklim yang datang takterduga dapat saja merusak hasil yang telah dicapai dan memberikan hambatan pencapaian tujuan Pembangunan. Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan sebelum

dilakukan penelitian ini tujuan utamanya yaitu penerapan program untuk mendukung penanganan perubahan iklim seperti program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim pada *Sustainable Development Goals (SDGS)*

b. Efektifitas pelaksanaan Program Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan Iklim di Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Kovic Salim, dkk Tahun 2022) dengan judul penelitian Evaluasi Efektivitas Program Kampung Siaga Bencana (KSB) Pegangsaan Dua : Studi Kasus Rw 03 dengan hasil penelitian mengatakan bahwa hasil evaluasi pada suatu program sangat bermanfaat untuk melihat sejauh mana program tersebut berdampak baik terutama bagi program KSB Pegangsaan Dua dimana didapatkan hasil bahwa KSB Pegangsaan Dua belum efektif, dimulai dari saat sebelum terjadi bencana masih terdapat kekurangan sarana prasarana yang dibutuhkan, gardu sosial yang jauh, dan kurangnya pemahaman kebencanaan kepada masyarakat jika dibandingkan dengan hasil penelitian ini yaitu hasil analisis deskriptif berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas pada program percepatan pencapaian tujuan Desa Tanggap Pengendalian dan perubahan iklim di Kabupaten Gowa, dengan olah data kuantitatif melalui kuesioner yang

dibagikan kepada 100 responden dari lima Desa yang menjadi lokasi penelitian menghasilkan pembahasan sebagai berikut:

1. Tujuan dan Indikator Yang Jelas, meliputi tujuan yang terdefinisi dimana program harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Kedua Indikator Kinerja yang terukur harus ditetapkan di awal program dapat mencakup aspek seperti peningkatan kesadaran lingkungan, atau peningkatan ketahanan pangan. Indikator tujuan dan indikator yang dengan skor 65,5 menunjukkan angka paling tinggi dibandingkan dengan dua indikator lainnya. Jika dikategorikan masih berada pada kategori efektif, artinya indikator tujuan dan indikator yang jelas memiliki pengaruh sebesar 65,5 dalam mempengaruhi Tingkat efektifitas dari implementasi program Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan Iklim yang ada di Kecamatan Barombong.
2. Keterlibatan *Stakeholder*, meliputi analisis partisipasi Aktif Dimana tingkat keterlibatan dan partisipasi aktif dari berbagai stakeholder, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, LSM, dan sektor swasta, sangat penting. Kedua komunikasi dan koordinasi, Komunikasi yang efektif dan koordinasi antar stakeholder memastikan bahwa semua pihak memahami peran mereka dan bekerja menuju tujuan yang sama. Indikator keterlibatan *stakeholder* berada pada skor 63 memiliki pengaruh sedikit lebih kecil dari indikator pertama. Namun jika

dikategorikan masih berada pada kategori efektif dalam mempengaruhi Tingkat efektifitas implementasi program Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan Iklim yang ada di Kecamatan Barombong.

3. Sumber Daya dan Kapasitas, meliputi Ketersediaan Sumber Daya yang memadai, termasuk dana, tenaga kerja, dan infrastruktur, sangat penting untuk pelaksanaan program yang efektif. Kedua Kapasitas dan Kompetensi, Kemampuan dan kompetensi dari tim pelaksana program serta masyarakat lokal mempengaruhi efektivitas program. Pada implementasi program indikator sumber daya dan kapasitas berada pada kategori efektif 63,5 Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kecenderungan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas berada pada kategori Efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kualitatif, Evaluasi menggunakan model CIPP menunjukkan bahwa program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim di Kecamatan Barombong umumnya berhasil dalam mencapai tujuan. Meskipun ada beberapa kendala seperti kekurangan sarana dan prasarana, Finansial, dan perlu peningkatan SDM. Dari keenam program yang ada satu program yang belum mampu dilaksanakan oleh pemerintah desa yang ada di kecamatan barombong yaitu MOU dengan BPBD Kabupaten, UPT KPH, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, secara keseluruhan program ini memberikan dampak positif bagi desa-desa yang terlibat.

Berdasarkan Analisis secara kuantitatif terkait Tingkat efektivitas dari implementasi program desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim yang ada di Kecamatan Barombong dihasilkan bahwa ketiga Indikator yang diteliti pada 5 lokasi berada pada kategori baik, namun bila dilihat secara parsial, Tujuan dan indikator yang jelas skor 65,5 menunjukkan angka paling tinggi dibandingkan dengan Dua indikator lainnya, secara keseluruhan Tingkat efektifitas berada pada angka 64, sedangkan angka terendah pada indikator keterlibatan *stakeholder*. Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kecenderungan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas berada pada kategori

fektif. Hasil analisis data kuantitatif ini menjadi pendukung data kualitatif pada evaluasi proram desa tanggap pengendalian dan perubahan iklim yang diterapkan diwilayah tersebut.

B. Saran

Disarankan untuk lebih meningkatkan aspek komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Gowa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program Desa Tanggap Pengendalian dan Perubahan Iklim dalam mencapai Target pada yaitu Indeks ratio bencana (IRT) mencapai 0 diseluruh RT, dan penanganan/mitigasi resiko bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT Di Kecamatan Barombong.

★ Solusi Implementasi langkah-langkah sederhana seperti penanaman pohon atau penghijauan jalan dapat memperbaiki kualitas udara dan lingkungan, Dengan lingkungan yang lebih bersih dan hijau, kualitas hidup masyarakat akan meningkat secara keseluruhan. Kesehatan masyarakat juga akan meningkat dengan adanya lingkungan yang lebih sehat dan bebas polusi. Pengurangan Risiko Bencana Dengan adanya sistem peringatan dini dan peningkatan kesiapsiagaan, risiko dampak bencana iklim seperti banjir dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adellia, Yolanda, and Arin Prajawinanti. 2021. "Implementasi Model Evaluasi Cipp Pada Pelaksanaan Program Kelompok Belajar TBM Leshutama Era Pandemi Covid-19." *Pustaka Karya: Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 9(2): 14.
- Afifuddin, Mohammad. 2021. "Implementasi SDGs Desa Dalam Membangun Resiliensi Desa Di Pulau Madura: Studi Terhadap Desa Dasok Dan Desa Alang-Alang." *Sensosio Unram* 2: 471.
- Arifin, R. 2016. "Evaluasi Program Layanan Perpustakaan Di SDN Karangrejo 2 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak." (1963).
- Awan Y.Abdoellah, Yudi Rusfiana. "BUKU - TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.Pdf."
- Azwar. 2021. "DI MASA PANDEMI COVID-19 (EVALUATION OF THE SUCCESS OF DISTANCE LEARNING SYSTEM AT FINANCIAL EDUCATION AND TRAINING AGENCY OF MAKASSAR." 19: 53–67.
- Basuki, Tyas Mutiara et al. 2022. "Improvement of Integrated Watershed Management in Indonesia for Mitigation and Adaptation to Climate Change: A Review." *Sustainability (Switzerland)* 14(16). <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/16/9997>.
- Boekoesoe, Lintje, and Tri Septian Maksum. 2022. "Optimalisasi Pembangunan Desa Dalam Mewujudkan SDGs Desa." *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)* 11(1): 209–18.
- Carlsen, Lars, and Rainer Bruggemann. 2022. "The 17 United Nations' Sustainable Development Goals: A Status by 2020." *International Journal of Sustainable Development and World Ecology* 29(3): 219–29.
- Dai, Jianhui, and Rashid Menhas. 2020. "Sustainable Development Goals,

Sports and Physical Activity: The Localization of Health-Related Sustainable Development Goals through Sports in China: A Narrative Review.” *Risk Management and Healthcare Policy* 13: 1419–30. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2147/RMHP.S257844>.

Fauzy, Akhmad, Lutfi Chabib, and Anggara Setyabwana Putra. 2019. “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Penanggulangan Bencana.” *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship* 4(3): 171–80.

https://www.researchgate.net/publication/338252910_Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan_Untuk_Penanggulangan_Bencana.

Franco, Jennifer C., and Saturnino M. Borrás. 2019. “Grey Areas in Green Grabbing: Subtle and Indirect Interconnections between Climate Change Politics and Land Grabs and Their Implications for Research.” *Land Use Policy* 84: 192–99.

Fuso Nerini, Francesco et al. 2019. “Connecting Climate Action with Other Sustainable Development Goals.” *Nature Sustainability* 2(8): 674–80. <https://www.nature.com/articles/s41893-019-0334-y>.

He, Xiaoni et al. 2020. “Implementation Plan for Low-Carbon Resilient City towards Sustainable Development Goals: Challenges and Perspectives.” *Aerosol and Air Quality Research* 20(3): 444–64. <https://aaqr.org/articles/aaqr-19-11-0a-0568>.

Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2021. “Panduan Penanganan Bencana Di Desa (Lampiran Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021.” : 1–42. <https://repository.unsri.ac.id/12539/>.

Kovic Salim, Dara Pristina, Samuel Christian, and Angrenggani Pramitasari. 2022. “Evaluasi Efektivitas Program Kampung Siaga Bencana (Ksb) Pegangsaan Dua : Studi Kasus Rw 03.” *Jurnal Pelita*

Kota 3(2): 189–206.

Kurniawan, Edi dkk. 2008. “Buku Panduan Unnes Giat Penguatan Generasi Milenial Mendukung SDGs Desa.” *LPPM Unnes*: 282.

Leal Filho, Walter et al. 2019. “Sustainable Development Goals and Sustainability Teaching at Universities: Falling behind or Getting Ahead of the Pack?” *Journal of Cleaner Production* 232: 285–94. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619318451>.

Leontinus, Gindo. 2022. “PROGRAM DALAM PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) DALAM HAL MASALAH PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA.” *Jurnal Samudra Geografi* 5(1): 43–52.

Luqmania, Dewi et al. 2022. “MAS KLIMIS (MASYARAKAT PEDULI IKLIM YANG HARMONIS) KENDARAAN PT PJB UP GRESIK DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs).” *Share : Social Work Journal* 12(1): 45.

Malihah, Lola. 2022. “Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan.” *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 17(2): 219–32.

Morton, S., D. Pencheon, and G. Bickler. 2019. “The Sustainable Development Goals Provide an Important Framework for Addressing Dangerous Climate Change and Achieving Wider Public Health Benefits.” *Public Health* 174: 65–68.

Muh. Fruyal Akbar, S.IP., M.Si, and M.Si Widya Kurniati Mohi, S.IP . 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Ekbijakan Di Indonesia)*.

Muhiddin, Amir. 2017. “Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa

Menerima Dana Desa Di Kabupaten Gowa).” *Universitas Negeri Makassar*. 1–339. <http://eprints.unm.ac.id/4365/1/AMIRMUHIDDIN.pdf>.

Mustari, Nuryanti. 2015. “Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik).” *Kebijakan Publik Deliberatif* 1: 286.

Newell, Peter et al. 2019. “Climate Smart Agriculture? Governing the Sustainable Development Goals in Sub-Saharan Africa.” *Frontiers in Sustainable Food Systems* 3.

Ng, Mee Kam. 2020. “Sustainable Development Goals (SDGs) and Pandemic Planning.” *Planning Theory and Practice* 21(4): 507–12. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14649357.2020.1807130>

Rane, Nitin. 2023. “Roles and Challenges of ChatGPT and Similar Generative Artificial Intelligence for Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).” *SSRN Electronic Journal*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4603244.

Siti Khoiriah, Candra Perbawati. 2022. *PERAN DESA MENUJU SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (STUDI PADA DESA-DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)*.

Sj, Chandra Julihandono. “EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BELANJA PRIORITAS PROGRAM PADAT KARYA UNTUK MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN DI MASA PANDEMI.” 8(2023): 51–62.

Streimikis, Justas, and Tomas Baležentis. 2020. “Agricultural Sustainability Assessment Framework Integrating Sustainable Development Goals and Interlinked Priorities of Environmental, Climate and Agriculture Policies.” *Sustainable Development* 28(6): 1702–12. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sd.2118>.

Susanti, Rina, Rifardi Rifardi, and Yoskar Kadarisman. 2021. "Peran Masyarakat Dalam Pencapaian Target Sustainable Development Goals Desa Layak Air Bersih Dan Sanitasi." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3(3): 1253–63.

